



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 050/207/2023

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2023-2026

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyebutkan bahwa kewajiban bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melakukan penilaian risiko;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penilaian Risiko Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penerlitain dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 276 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023-2026.**
- KESATU** : Penilaian Risiko Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Keputusan Wali Kota ini, mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal Januari 2023

WALI KOTA DUMAI,

  
PAISAL

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
2. Kepala Perangkat Daerah Kota Dumai.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 050/ /2023  
TENTANG PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KOTA  
DUMAI TAHUN 2023-2026

PENILAIAN RISIKO STRATEGIS KOTA DUMAI  
TAHUN 2023 – 2026

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil penilaian risiko terdapat 56 (lima puluh enam) risiko strategis Kota Dumai yang dapat berdampak negatif pada pencapaian sasaran strategis Kota Dumai. Dari seluruh risiko tersebut, terdapat 10 risiko yang menjadi fokus utama Kota Dumai karena peringkat risikonya tertinggi dengan uraian sebagai berikut:

A. Matriks Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4			RSP.22.03.05, 22,31.01.24	RSP.22.27.01.16 RSP.22.01.08, 38.01.21 RSP.22.30.01.23 RSP.22.06.01.42	RSP.22.17.01.01
	Mungkin	3			RSP.22.02.01.19 RSP.22.04.01.36	RSP.22.07.01.09	
	Kemungkinan Kecil	2					RSP.22.03.01.25
	Sangat jarang	1					
Keterangan Status Risiko			Sangat rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi

B. Tabel Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian.

KODE RISIKO	URAIAN RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	OUTPUT	TARGET WAKTU
RSP.22.17.01.01	Kurangnya kemandirian usaha UMKM dan IKM sehingga kualitas produknya belum mampu berdaya saing dengan industri lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat dukungan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan Industri Besar serta mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan</li> <li>Memantapkan kelembagaan pelaku usaha untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan daya saing produk usaha berupa</li> <li>penguatan koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha</li> <li>Bantuan Modal Usaha Untuk UMKM Rintisan Pemasaran dengan E-Commerce</li> <li>Promosi investasi dilakukan juga secara offline</li> <li>Konsep pengembangan industri Kota Dumai termasuk membangun kawasan industri Selinsing</li> <li>Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukkan Industri Lubuk Gaung dan Pelintung serta pengembangan kawasan industri lainnya</li> <li>Membuat rencana induk pengembangan kawasan industri di Kota Dumai</li> <li>Melakukan revisi terkait Peraturan Walikota tentang RDTR Kawasan Industri dan Kota Dumai Tahun 2021-2041</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Induk Pengembangan Industri Kota</li> <li>Jumlah koperasi yang aktif</li> <li>Jumlah UMKM yang memanfaatkan e-commerce</li> <li>Pertemuan dengan investor</li> <li>Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kota</li> <li>Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kota dan Pembangunan Sarana dan Pra sarana Peruntukkan Industri Lubuk Gaung dan Pelintung serta pengembangan kawasan industri lainnya</li> <li>Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kota</li> <li>Dokumen Review RDTR dan Perubahan Peraturan Walikota tentang Kawasan Industri dan Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Triwulan II tahun 2024</li> <li>Triwulan I tahun 2023</li> </ol>

KODE RISIKO	URAIAN RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	OUTPUT	TARGET WAKTU
			Dumai Tahun 2021-2041	
RSP.22.07.01.09	Terbatasnya peluang kesempatan kerja dan berwirausaha di Kota Dumai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai dengan memfungsikan 4 rumah terampil di Dumai Timur, Sungai Sembilan, Medang Kampai, dan Bukit Kapur</li> <li>Pengembangan potensi pemuda/ Angkatan Kerja melalui pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha</li> <li>Mengembangkan dan Memperbanyak Usaha yang Menyerap banyak tenaga Kerja (File PPD 2022 Hal 29)</li> <li>Pengembangan Potensi Pemuda Melalui Pelatihan Sesuai dengan Kompetensi dan Kebutuhan Dunia Usaha (File PPD 2022 Hal 29)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memfungsikan 4 rumah terampil</li> <li>Jumlah pemuda/ Angkatan Kerja yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha di Kota Dumai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 rumah terampil per tahun</li> <li>Tahun 2023 - 2026</li> </ol>
RSP.22.27.01.16	Belum meratanya ketersediaan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan peraturan terkait alih fungsi lahan pertanian</li> <li>Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Perda LP2B</li> <li>Jumlah Koordinasi lintas sektor pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2023 – 2026</li> <li>Tahun 2023 – 2026</li> </ol>
RSP.22.02.01.19	Menurunnya kualitas hidup masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama untuk pelaksanaan pencapaian Standar pelayanan Minimal diantaranya pengembangan Puskesmas Rawat Inap di Daerah yang jauh dari Kota</li> <li>memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan memperluas cakupan UHC</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Faskes yang ditingkatkan sarana pelayanannya</li> </ol>	2023 – 2026
RSP.22.30.01.23	Kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan barang penting	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi produksi lokal bahan pokok masyarakat dan barang penting</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait</li> <li>Memaksimalkan tugas tim pengendalian inflasi daerah (TPID).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah produk lokal yang di intensifikasi dan diversifikasi</li> <li>Hasil Koordinasi dengan stakeholder lainnya</li> </ol>	2023 – 2026
RSP.22.03,05,22,31.01.24	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya melayu Kota Dumai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan ornamen melayu pada bangunan perkantoran dan fasilitas umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ornamen melayu pada bangunan perkantoran dan fasilitas umum</li> </ol>	2023 – 2026
RSP.22.03.01.25	Jalan akses untuk aktivitas masyarakat diantaranya sekolah, perkantoran, pasar, dan fasilitas kesehatan yang beririsan dengan aktivitas industri	<p>Mewujudkan akses jalan lingkaran luar (outer ringroad) melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengusulan Jalan Outer Ringroad terdiri atas 3 (tiga) segmen melalui APBN maupun Investor</li> <li>Pengusulan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di KLHK</li> <li>Pengadaan patok batas jalan (crosscutting dengan Bidang Pertanahan Perkim)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya akses jalan outer Ringroad</li> <li>Tersedianya Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan</li> <li>Terpasangnya patok batas jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2024</li> <li>Tahun 2023</li> <li>Tahun 2023</li> </ol>
RSP.22.04.01.36	Lambatnya penyelesaian sengketa tanah di Kota Dumai terkait kawasan hutan dan kawasan BMN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Walikota dengan internal pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta pihak lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil dokumentasi atas Kepastian hukum terhadap tanah sesuai Undang-undang yang berlaku</li> </ol>	2022-2026
RSP.22.06.01.42	Ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan bantuan kepada korban bencana secara optimal</li> <li>Menyusun Kebijakan terkait bantuan sosial terhadap korban bencana</li> <li>Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Korban bencana yang diberikan bantuan / tertangani</li> <li>Perwa/Perda terkait bansos korban bencana</li> </ol>	2023-2026

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

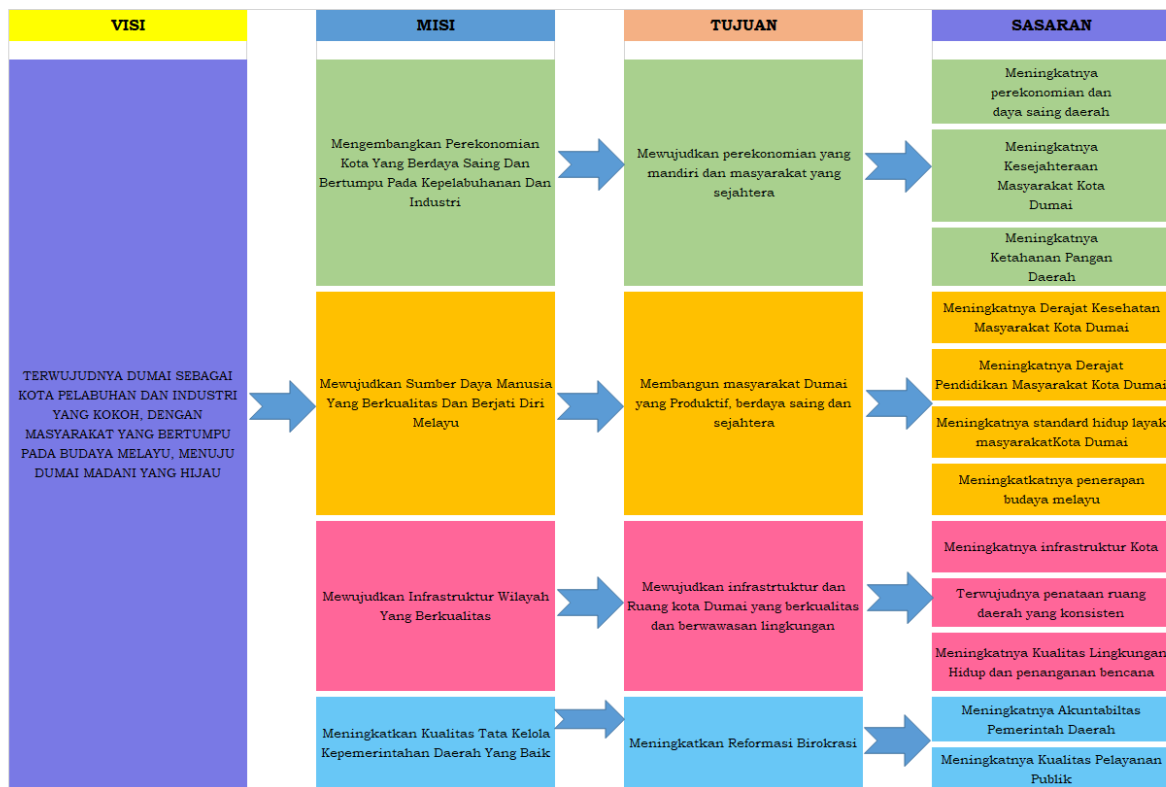
Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pimpinan instansi pemerintah dan segenap komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Selain itu, Pimpinan instansi beserta pejabatnya juga berkewajiban untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada lingkungan organisasi dan memastikan hal tersebut melekat pada setiap jenjang organisasi. Untuk itu Pemerintah Kota Dumai perlu menetapkan penilaian risiko.

### B. Maksud dan Tujuan.

Penilaian risiko strategis pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappedalitbang selaku koordinator teknis.

### C. Ruang Lingkup.

Penilaian risiko strategis pemerintah daerah dilakukan atas 21 (dua puluh satu) sasaran strategis untuk tahun 2023 – 2026 yang merupakan periode waktu yang tersisa dari RPJMD Pemerintah Kota Dumai tahun 2021-2026. 12 (dua belas) sasaran tersebut merupakan penjabaran dari 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) Misi dari RPJMD Pemerintah Kota Dumai tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut:



Sedangkan Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyusunan penilaian risiko strategis pemerintah daerah adalah sebanyak 24 Perangkat Daerah yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
2. Dinas Kesehatan Kota Dumai;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;
5. Inspektorat;
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;
7. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
9. Dinas Perikanan Kota Dumai Kota Dumai;
10. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai;
11. Dinas Perdagangan Kota Dumai;
12. Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai;
14. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai;
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai;
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
20. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dumai;
21. Dinas Perhubungan Kota Dumai;
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
23. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai;
24. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai memuat sejarah, aspek geografi dan demografi, serta aspek pencapaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

### A. Aspek Geografi.

Kota Dumai dijuluki dengan DUMAI KOTA IDAMAN, (kota tujuan Investasi yang berDayasaing dengan pemerintahan Amanah yang didukung oleh masyarakat Mandiri dan berAdab serta lingkungan yang Nyaman). Kota Dumai Memiliki wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dan memiliki luas daratan 206.673,36 (dua ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh enam) hektar. Pembagian wilayah administrasinya adalah sebanyak 7 kecamatan dengan 36 kelurahan.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik.

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah. Berdasarkan kondisi geografis, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupa, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Namun demikian, Kota Dumai berpotensi adanya bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan lahan, banjir, abrasi, dan non alam diantaranya wabah Covid-19.

Penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2030 seluas 206.476,83 Ha yang proporsi terbesarnya digunakan untuk kawasan hutan produksi tetap sebesar 58,72%, kawasan industri sebesar 3,68%, kawasan perumahan sebesar 12,13%, kawasan pertanian sebesar 7,26%, dan kawasan taman wisata alam sebesar 1,73%.

### B. Aspek Demografi.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami penambahan dari 291.908 Jiwa tahun 2016 menjadi 323.452 jiwa pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 2016-2021 sebesar 2,07% per tahun. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

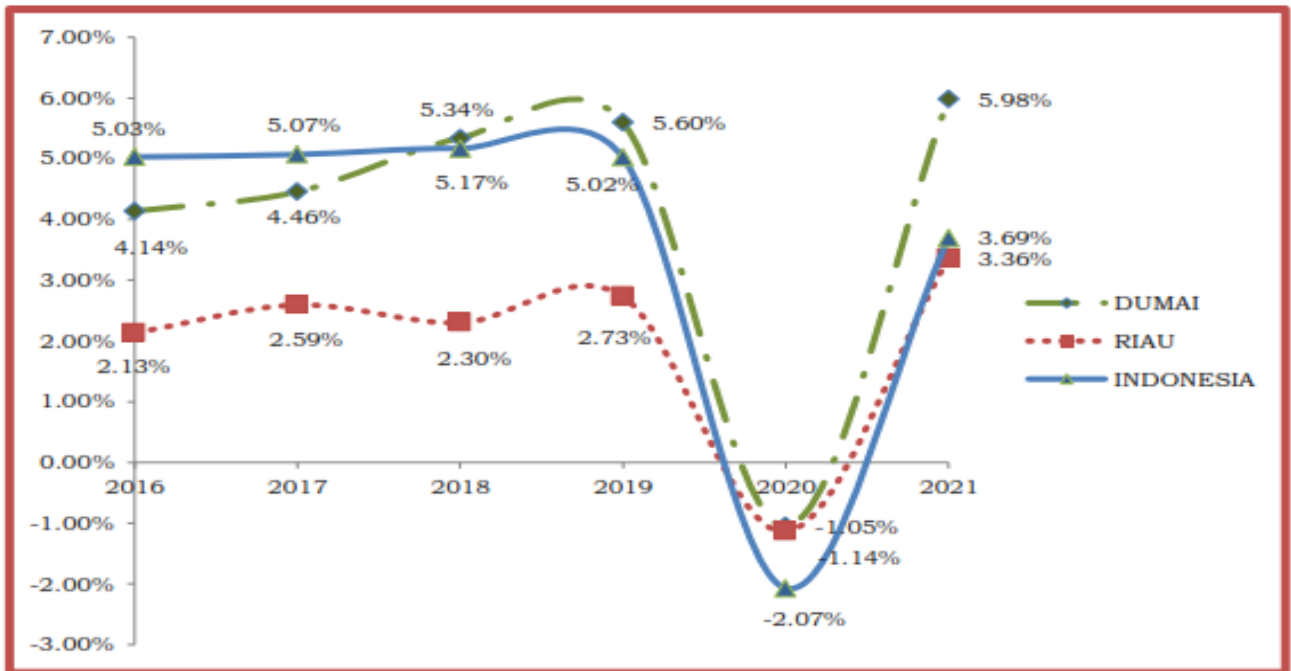
Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,17% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,19%, Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, maka Kota Dumai menempati pertumbuhan penduduk tertinggi

kedua setelah Kabupaten Pelalawan sebesar 2,82% selama periode tahun 2016-2021. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten dan kota juga antar provinsi.

C. Aspek Pencapaian Kinerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Jika diamati selama periode 2016-2021, hanya pada tahun 2016 dan 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Selanjutnya khusus pada tahun 2020, kontraksi laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1.05% disebabkan oleh tujuh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif. Ketujuh sektor adalah sektor transportasi dan pergudangan tumbuh -34.64%; jasa perusahaan tumbuh -21.64%; jasa lainnya tumbuh -20.03%; penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh -20.01%; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh -10.32%; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh -2.16%. Negatifnya pertumbuhan tujuh sektor tersebut tidak terlepas dari adanya pembatasan mobilitas penduduk yang berdampak pada berkurangnya mobilitas barang dan jasa sehingga mempengaruhi penawaran barang dan jasa oleh produsen dan masyarakat.



Grafik 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2016-2021

Meningkatnya konsumsi rumah tangga diiringi dengan meningkatnya investasi (Pembentukan modal tetap bruto) di Kota Dumai yang tumbuh sebesar 2,28% dan konsumsi pemerintah yang juga tumbuh sebesar 2,68% serta tumbuhnya ekspor barang/jasa sebesar 30,56%. Secara umum, pada tahun 2021 daya beli dan ekspansi usaha kembali meningkat sehingga volume konsumsi agregat juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu mencapai 5,98 persen.

Dari sisi lapangan usaha, semua sektor mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 26,75%. Adapun Sektor lain yang tumbuh diatas 5% adalah sector penyediaan jasa akomodasi dan makanan dan minuman (19,10%); sektor Industri pengolahan (6,56%); sector pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (7,79%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,02%); sektor jasa kesehatan dan kegiatansosial (10,33%) dan sektor jasa lainnya (5,84%).

Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi:

a. Laju inflasi.

Inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara mikro. inflasi tertinggi di Kota Dumai terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,85% dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau. RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dan terendah tahun 2019 sebesar 1,28% dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Riau.



Grafik 1.2. Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau. 2016- 2021.

Sementara itu perkembangan inflasi sektoral tahun 2016- 2021 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 4,55% per tahun dan kondisi ini menggambarkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan listrik dan gas sangat berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada sektor tersebut dan sektor lainnya. Selanjutnya sektor penyediaan industri pengolahan menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,18% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2016-2021 adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib hanya sebesar 1,94% per tahun.



Grafik. 1. 3. Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai , 2021

b. Nilai Tukar Petani (NTP).

Terjadinya peningkatan nilai NTP dari tahun 2016 sebesar 100,20 menjadi sebesar 100,91 pada tahun 2020, hal ini menerangkan bahwa telah terjadi keberhasilan daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan dukungan pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani sehingga meningkatkan nilai tukar petani.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2020, walaupun jumlah koperasi mengalami penurunan sebesar -1,32% per tahun. Selanjutnya terkait dengan UKM diketahui bahwa jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2015-2020 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 Kecamatan 1 orang pendamping. Dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1: 2.304.

2. Indeks Gini.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2017-2021, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Gini rasio kota Dumai pada tahun 2021 adalah sebesar 0,345 turun dari tahun 2020 yaitu sebesar 0,360. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat kota Dumai sudah semakin kecil (baik).



Grafik 1. 4. Trend Indeks Gini Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 8,98% pada tahun 2016 menurun menjadi 6,92% pada tahun 2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -4,48% per tahun.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangi tingkat pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ketempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri.

Tabel 1.1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	2,07
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	201.550	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	2,72
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	1,91
Jumlah Menganggur	Orang	11.864	12.130	8.221	9.726	12.005	12.005	2,35
TPT	%	8,98	8,94	6,04	6,47	8,19	6,29	-4,48

#### 4. Perkembangan Kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Dumai secara signifikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan sebesar 4,74%, menurun menjadi 3,42% pada tahun 2021. Selama periode 2016-2021, tingkat kemiskinan rata-rata menurun sebesar - 5,89% per tahun. Tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2021 sebesar 3,42% lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar 7,12% tahun 2021 sebagaimana tergambar di bawah ini:

Tabel 1.2. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator Kemiskinan	T A H U N						Rata- Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	13.76	13.53	11.19	10.95	9.88	10.57	-4.78
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	4.74	4.57	3.71	3.56	3.16	3.42	-5.89
3	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.62	0.84	0.46	0.28	0.31	0.40	-1.83
4	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0.13	0.25	0.07	0.05	0.05	0.07	6.35
5	Garis Kemiskinan (Rp. Bulan/Kapita)	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	6.64

Dari tabel di atas, jika diperhatikan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar Perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Namun setelah tahun 2016 sudah dilakukan penyusunan SPKD sehingga program penanggulangan kemiskinan lebih terarah. Namun demikian harus lebih fokus dan terintegrasi dengan OPD terkait agar upaya penanggulangan kemiskinan lebih optimal untuk mengurangi fluktuasi perkembangan indikator kemiskinan.

## 5. Ketersediaan Pangan Utama

Beberapa kondisi terkait ketersediaan pangan yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu:

- a. Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (89,40 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun. Tingginya impor beras juga disebabkan belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya. Selain itu karena rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan kebanyakan lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian merupakan kawasan hutan.
- b. Terdapat 3 komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.
- c. Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan.
- d. Di Kota Dumai Jumlah penyuluh pertanian semakin hari semakin sedikit. Idealnya setiap satu kelurahan dibawah oleh satu Penyuluh Pertanian. Sehingga untuk Kota Dumai dengan 34 Kelurahan harus memiliki 34 Orang penyuluh pertanian diluar Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Balai Penyuluh Pertanian. Jika dilihat dari tabel di atas maka untuk tahun 2021 jumlah penyuluh pertanian yang masih aktif berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS 5 Orang, Penyuluh Pertanian THL-TBPP 5 Orang dan Penyuluh Pertanian Kontrak 3 Orang. Jumlah tersebut sangatlah kurang jika dibandingkan jumlah kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 34 kelurahan.

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai, 2016-2021 lihat Tabel di bawah ini:

Tabel 1.3. Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	T A H U N						Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indek Pembangunan Manusian (IPM)	Indek	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75	0,49

Indikator	Satuan	T A H U N						Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	13,31	0,72
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	10,14	1,26
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93	70,98	0,22

## 7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2016-2021 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 1,15% per tahun, namun memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional akan tetapi dari aspek kualifikasi pendidikan dan penduduk Kota Dumai SMA sudah berada pada level kelas satu di tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai. Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2016-2021

Wilayah	RLS Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kota Dumai	9.58	9.67	9.84	9.85	10.07	10.14	1.15
Provinsi Riau	8.59	8.76	8.92	9.03	9.14	9.19	1.36
Indonesia	7.95	8.10	8.17	8.34	8.48	8.54	1.44

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tahun 2016-2021 di Kota Dumai memiliki tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,87% per tahun. Pencapaian angka HLS Kota Dumai dari tahun 2016 yaitu sebesar 11,67 tahun meningkat menjadi 13,31 tahun pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 0,87 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh income per kapita rumah tangga dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang merupakan harapan untuk memperbaiki kehidupan masa depan. Untuk diketahui bahwa Kota Dumai merupakan salah satu Kota yang memprioritas pendidikan sejak lama.

Tabel 1.5. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai. Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2016-2021

Wilayah	Satuan	T A H U N						Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kota Dumai	Tahun	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	13,31	0,87
Provinsi Riau	Tahun	12,86	13,03	13,11	13,14	13,20	13,28	0,65
Indonesia	Tahun	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	0,56

Pelayanan bidang pendidikan di Kota Dumai yang perlu menjadi perhatian untuk kondisi sebagai berikut:

- a. Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2015-2020 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan 0,51% per tahun dan -0,04% per tahun. Pada tahun 2018 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya begitu juga APK jenjang SMP/MT mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan.

- b. Berfluktuatifnya APM dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM.
- c. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2016 sebesar 0,003%, namun pada tahun 2020 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,096% dengan rata-rata angka putus sekolah selama tahun 2016-2020 sebesar 0,05%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2016 angka putus sekolah adalah sebesar 0,049%, namun pada tahun 2020 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,086%. Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun.
- d. Rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP tetap harus menjadi perhatian karena jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per Kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan-Kecamatan di wilayah kota. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.
- e. Jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak ringan mengalami peningkatan sebesar 17,62% per tahun atau naik dari 191 ruang kelas tahun 2016 menjadi 324 ruang kelas tahun 2020. Kondisi ruang kelas SMP dari tahun 2016 -2020 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebesar 71,37% pada tahun 2020. Oleh karena Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar dan mengajar sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa di Kota Dumai.
- f. Distribusi guru belum merata per Kecamatan sesuai dengan distribusi siswa. Di Kecamatan-Kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP memiliki beban rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari perkotaan. Misalnya jenjang pendidikan SD di Kecamatan Bukit Kapur rasio guru terhadap siswa sebanyak 19,34 siswa. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.
- g. Turunnya persentase guru SMP yang bersertifikasi disebabkan oleh penambahan jumlah guru lebih tinggi sebesar 8,75% per tahun dibandingkan dengan penambahan jumlah guru bersertifikasi hanya 2,42% per tahun.

## 8. Usia Harapan Hidup

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2016-2021 cenderung meningkat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6. Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	T A H U N						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kota Dumai	Tahun	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93	70,98	0,190
2	Provinsi Riau	Tahun	70,97	70,99	71,19	71,48	71,60	71,67	0,197
3	Indonesia	Tahun	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	73,5	0,728

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2016-2021 cenderung meningkat. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Pembangunan Bidang kesehatan di Kota Dumai yang perlu menjadi perhatian untuk kondisi sebagai berikut:

- a. Angka Kematian balita per Kecamatan di Kota Dumai dari selama tahun 2016-2021 fluktuatif. Kecamatan Dumai Barat merupakan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi angka kematian balita per 1.000 balita sebesar 1,61% per tahun.
- b. Dari data angka kematian ibu tahun 2016-2020 menurut Kecamatan dari tujuh Kecamatan terdapat tiga Kecamatan yaitu Dumai Kota, Bukit Kapur dan Medang Kampai dan terbanyak di Kecamatan Medang Kampai sebesar 265 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di Kota Dumai.

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit.

- c. Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai per Kecamatan tahun 2016-2021 masih sangat rendah, belum mencapai 100%. Cakupan terendah berada di Kecamatan Dumai Timur, rata – rata pertahunnya hanya 17,00 % dari target 100%. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan.

- d. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2016-2021 fluktuatif, belum mencapai target 100%.
- e. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Misalnya, masih ada puskesmas yang belum memiliki IPAL, generator set (Genset), sarana air bersih (SAB) seperti sumur bor dalam. Masih ada puskesmas yang tidak memiliki ambulans padahal seluruh puskesmas telah mempunyai pelayanan kegawatdaruratan (UGD), sedangkan puskesmas yang memiliki ambulans kondisinya sudah mulai rusak.
- g. Permasalahan pengelolaan sampah medis baik di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan mandiri di Kota Dumai masih menjadi kendala utama karena belum tersedia di Kota Dumai.
- h. Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memilikipelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko.
- i. Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti seperti perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi, belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan ± 80% penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk.
- j. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2019, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Militus, Asma, Kecelakaan, Stroke, Hypertensi dan kanker.

## 9. Perkembangan Seni Budaya

Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar. Penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2021 di tingkat Sekolah Dasar sudah mencapai 100,00% sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 102,63% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum muatan lokal pada Pendidikan dasar pada tahun 2021 adalah sebesar 92,64%. Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib

pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2021 adalah sebesar 85,95%. Sedangkan rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah Pendidikan Menengah pada tahun 2016 sebesar 74,29% kemudian meningkat menjadi sebesar 100,00% pada tahun 2021.

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran senibudaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

Festival seni dan budaya diselenggarakan secara rutin di Kota Dumai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dimaksudkan untuk pelestarian seni dan budaya melayu serta penguatan karakter bangsa sehingga generasi muda dapat mengenali dan memahami kesenian dan kebudayaannya sendiri serta dapat meneruskan ke generasi berikutnya antara lain: Festival Layang-layang, Lomba Gasing, Panggung Seni Rakyat, Lomba Pantuan dan Syair, Festival Kompang, Rebana dan Nasyid serta Lomba Masakan Kuliner.

## 10. Perkembangan Olah Raga

Pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di Kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada wilayah lainnya di Provinsi Riau.

## 11. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Terdapat beberapa kondisi infrastruktur Kota Dumai yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yaitu:

- a. Hingga tahun 2019 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,92. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat.
- b. Jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Dumai tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,59%, 0,80% dan 0,71% . Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.
- c. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2020 tersisa 33,75 Ha kawasan kumuh perkotaan dan Rumah tidak layak huni sebanyak 9.724 unit.
- d. Meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman.

- e. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.
- f. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 1:83 di tahun 2016 menjadi 1:127 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

## 12. Ketaatan Terhadap RTRW

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 202.199 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

## 13. Indek Kualitas Air

Beberapa kondisi terkait indeks kualitas air yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu:

- a. Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi.
- b. Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2017-2018 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam, hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.
- c. Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai.
- d. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di semua titik pengujian sampel.

## 14. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Berdasarkan data tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik

**BAB III**  
**PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**A. Penetapan konteks/Tujuan**

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai yang akan dicapai . Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya. Berikut uraian tujuan/sasaran strategis yang akan dilakukan penilaian risiko:

**1. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Dan Daya Saing Daerah**

Kategori	Uraian				Sumber Data
Misi 1	Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri				RPJMD 2021 -2026
Tujuan 1	Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri Dan Masyarakat Yang Sejahtera				RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
Target tahun 2022	3,54				Rincian data pada lampiran tujuan 1a
Target tahun 2023	4,36				Rincian data pada lampiran tujuan 1b
Target tahun 2024	4,7				Rincian data pada lampiran tujuan 1c
Target tahun 2025	4,8				Rincian data pada lampiran tujuan 1d
Target tahun 2026	5,04				Rincian data pada lampiran tujuan 1e
Sasaran strategis	Meningkatnya Perekonomian Dan Daya Saing Daerah				RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis ...	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK trilyun	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB trilyun	PDRB Perkapita ADHK	PDRB Perkapita ADHB	
Target tahun 2022	26,29	38,9	80,98	119,809	Rincian data pada lampiran sasaran 1a
Target tahun 2023	27,44	41,52	83,48	126,301	Rincian data pada lampiran sasaran 1b
Target tahun 2024	28,73	43,52	86,34	130,794	Rincian data pada lampiran sasaran 1c
Target tahun 2025	30,11	46,61	89,37	138,351	Rincian data pada lampiran sasaran 1d
Target tahun 2026	31,63	48,93	92,73	143,466	Rincian data pada lampiran sasaran 1e
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...					RPJMD 2021 -2026
	1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian			
	2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	3.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata			
	4.	Dinas Perdagangan			
	5.	Sekretariat Daerah Kota Dumai			
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	Tujuan ini untuk mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai supporting agent bagi				

Kategori	Uraian	Sumber Data
	<p>kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.</p> <p>Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.</p> <p>Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( SPKD ) Kota Dumai.</p>	
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	Laju pertumbuhan ekonomi adalah Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$LPE = \frac{PDRB\ t - PDRB\ t-1}{PDRB\ t-1} \times 100\%$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data PDRB adhk Kota Dumai tahun 2010-2020	Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Buku PDRB publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Meningkatkan aktivitas ekonomi daerah baik secara makro dan mikro dengan didukung oleh iklim investasi yang baik	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	$\frac{\sum \text{nilai sektor PDRB ADHK}}{\sum \text{nilai sektor PDRB ADHB}}$ $\frac{\sum \text{nilai sektor PDRB ADHK} / \text{Jumlah penduduk (PDRB/Kapita)}}{\sum \text{nilai sektor PDRB ADHB} / \text{Jumlah penduduk (PDRB/Kapita)}}$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Nilai sektor PDRB merupakan hasil dari proyeksi Jumlah Penduduk merupakan hasil proyeksi PDRB Masukkan rumus umum PDRB berdasarkan pengeluaran = C + I + G +(X-M)	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data PDRB adhk dan adhb Kota Dumai tahun 2010-2020	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Buku PDRB publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...		
1. Kondisi Perekonomian Global	Kondisi perekonomian global sangat mempengaruhi PDRB Kota Dumai, Hal ini karena sektor industri pengolahan merupakan sektor yang dominan pada PDRB Kota Dumai berbasis kegiatan ekspor dan impor. Sehingga jika perekonomian global berfluktuatif maka perekonomian kota Dumai akan terdampak juga.	
2. Investasi	Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah/negara. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen. keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan, baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku)	
3. Ketersediaan Bahan Baku	Hampir seluruh sektor industri pengolahan kota Dumai berbasis hasil sumber daya alam khususnya sawit, jika aliran bahan baku dari sawit terhambat maka akan mempengaruhi produksi dari industri pengolahan	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Belum maksimalnya peran Kota Dumai sebagai PKN dan PKS sebagai Pusat Pertumbuhan regional didaerah Provinsi Riau yang dapat memberikan multiplier effect pada aktivitas ekonomi kota Dumai dan daerah hinterlan	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kawasan Industri, Kawasan Peruntukkan Industri, Pelabuhan Internasional, Pelabuhan Roro, Terminal penumpang dan barang, Bandar Udara	
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	Penyiapan regulasi tentang tata ruang, penyiapan jaringan air bersih dan jaringan gas untuk dukungan industri, meningkatkan kualitas jaringan jalan menuju KI/KPI	

## 2. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi ...	Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri	RPJMD 2021 -2026
Tujuan ...	Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri Dan Masyarakat Yang Sejahtera	RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan ...	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
Target tahun 2022	3,54	
Target tahun 2023	4,36	
Target tahun 2024	4,7	
Target tahun 2025	4,8	
Target tahun 2026	5,04	
Sasaran strategis ..	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis ...	Indeks Gini      Tingkat Pengangguran Terbuka      Tingkat Kemiskinan	
Target tahun 2022	0,36                      7,79                      3,51	Rincian data pada lampiran sasaran 2a

Kategori	Uraian			Sumber Data
Target tahun 2023	0,36	7,54	3,49	Rincian data pada lampiran sasaran 2b
Target tahun 2024	0,35	7,29	3,47	Rincian data pada lampiran sasaran 2c
Target tahun 2025	0,35	7,04	3,45	Rincian data pada lampiran sasaran 2d
Target tahun 2026	0,35	6,79	3,43	Rincian data pada lampiran sasaran 2e
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...				RPJMD 2021 -2026
	1.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
	2.	Dinas Tenaga Kerja		
	3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian		
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	<p>Tujuan ini untuk mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai supporting agent bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.</p> <p>Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim ivestasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.</p> <p>Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( RPKD ) Kota Dumai</p>			
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	Laju pertumbuhan ekonomi adalah Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu			
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$LPE = \frac{PDRB\ t - PDRB\ t-1}{PDRB\ t-1} \times 100\%$			
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan			
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data PDRB adhk Kota Dumai tahun 2010-2020		Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai	
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Buku PDRB publikasi BPS			
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)			
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maka diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan tingkat pengangguran, mengurangi kesenjangan yang ada dalam masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan .			

Kategori	Uraian	Sumber Data
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tingkat pengangguran terbuka</i> adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja</li> <li>• Tingkat kemiskinan adalah proporsi Penduduk di bawah garis kemiskinan</li> <li>• <i>Indeks Gini</i> atau <i>Rasio Gini</i> merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh</li> </ul>	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100\%$ $Po = \frac{\text{jumlah penduduk dibawah Garis Kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ $GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi - 1]$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	<p><u>TPT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.</li> <li>• Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</li> </ul> <p><u>Po:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan</li> <li>• Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.</li> </ul> <p><u>GR :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fi=Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i.</li> <li>• Yi=Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.</li> </ul>	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data BPS Kota Dumai tahun 2010-2020	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Buku publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...	Produktivitas sektor industri, .....	
4. Kondisi Perekonomian Global	Kondisi perekonomian Global sangat mempengaruhi Tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro	
5. Kompetensi SDM	Kompetensi SDM mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kemampuan ekonomi untuk bersaing mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan kerja baru di sektor informal	
6. Akses terhadap layanan dasar	Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, kesehatan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan daerah yang akhir mempengaruhi kompetensi SDM	
7. Kepemilikan Aset	Kurangnya kepemilikan kuantitas aset masyarakat mengurangi kemampuan dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk membuka lapangan kerja baru atau untuk akses permodalan	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai lebih tinggi dari rata-rata provinsi Gini rasio Kota Dumai lebih tinggi dari rata-rata provinsi	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLK di Kota Dumai</li> <li>• Kawasan Industri dan Peruntukkan Industri</li> <li>• Peningkatan Kawasan wisata baik kuliner maupun wisata alam</li> </ul>	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan untuk keluarga miskin baik dari pusat dan daerah (jamkesko, Bosda, JKN, dan bantuan dari kemensos)</li> <li>• Bantuan rehab rumah layak huni</li> </ul>	

### 3. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi ...	Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kelembuhan Dan Industri	RPJMD 2021 -2026
Tujuan ...	Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri Dan Masyarakat Yang Sejahtera	RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan ...	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
Target tahun 2022	3,54	
Target tahun 2023	4,36	
Target tahun 2024	4,7	
Target tahun 2025	4,8	
Target tahun 2026	5,04	
Sasaran strategis ..	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis ...	Skor Pola Pangan Harapan      Ketersediaan Pangan Utama	
Target tahun 2022	83,75      36,03	Rincian data pada lampiran sasaran 3a
Target tahun 2023	84,58      37,7	Rincian data pada lampiran sasaran 3b
Target tahun 2024	85,41      39,37	Rincian data pada lampiran sasaran 3c
Target tahun 2025	86,24      41,03	Rincian data pada lampiran sasaran 3d
Target tahun 2026	87,07      42,7	Rincian data pada lampiran sasaran 3e
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...		RPJMD 2021 -2026
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.	Dinas Perikanan	
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	<p>Tujuan ini untuk mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai supporting agent bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.</p> <p>Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim ivestasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.</p> <p>Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang</p>	

Kategori	Uraian	Sumber Data
	disinergiskan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( RPKD ) Kota Dumai	
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	Laju pertumbuhan ekonomi adalah Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$LPE = \frac{PDRB\ t - PDRB\ t-1}{PDRB\ t-1} \times 100\%$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data PDRB adhk Kota Dumai tahun 2010-2020	Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Buku PDRB publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Sasaran ini untuk mengantisipasi bahwa Perekonomian kota Dumai di proyeksi mengalami perkembangan yang signifikan sebagai daerah industri, PKN dan PKSN. Sebagai daerah industri, kota Dumai diperkirakan akan mengalami pertambahan penduduk tidak saja dari tingkat kelahiran tetapi juga dari faktor migrasi penduduk ke Kota Dumai. Seiring bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Namun Dengan tingginya tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pasokan pangan dari daerah lain, maka Ketahanan pangan Daerah menjadi hal yang prioritas dalam mewujudkan pembangunan ekonomi kota Dumai secara makro. Ketahanan pangan disini meliputi aspek ketersediaan, aspek stabilitas ketersediaan, aspek keterjangkauan	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Ketersediaan Pangan Utama adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi daerah dan Cadangan Pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	Skor PPH = skor PPH kelompok padia-padian + umbi-umbian +...+skor PPH kelompok lain $\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan  Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Dari Dinas Ketahanan Pangan	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Dari Dinas Ketahanan Pangan	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Dari Dinas Ketahanan Pangan	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...		
8. Ketersediaan Pangan	Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah	
9. Akses Pangan	kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan	
10. Pemanfaatan Pangan	Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kapasitas Produksi Kota Dumai sangat rendah dan menyebabkan ketergantungan supply dari daerah lain	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kota Dumai telah merencanakan lahan pangan pertanian berkelanjutan	

#### 4. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi ...	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu	RPJMD 2021 -2026
Tujuan ...	Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera	RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan ...	Indeks Pembangunan Manusia	
Target tahun 2022	74,826	Rincian data pada lampiran tujuan 2a
Target tahun 2023	75,04	Rincian data pada lampiran tujuan 2b
Target tahun 2024	75,254	Rincian data pada lampiran tujuan 2c
Target tahun 2025	75,468	Rincian data pada lampiran tujuan 2d
Target tahun 2026	75,683	Rincian data pada lampiran tujuan 2e
Sasaran strategis ..	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis ...	Indeks Kesehatan	
Target tahun 2022	0,785	Rincian data pada lampiran sasaran 4a
Target tahun 2023	0,786	Rincian data pada lampiran sasaran 4b
Target tahun 2024	0,786	Rincian data pada lampiran sasaran 4c
Target tahun 2025	0,787	Rincian data pada lampiran sasaran 4d
Target tahun 2026	0,788	Rincian data pada lampiran sasaran 4e
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...		RPJMD 2021 -2026
1.	DINKES	
2.	RSUD	
3.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.	

Kategori	Uraian	Sumber Data
	<p>Tujuan ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.</p> <p>Tujuan ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .</p> <p>Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya</p>	
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$IPM = (\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}) \times 100$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	I Kesehatan = Indeks Kesehatan = Dimensi Kesehatan I Pendidikan = Indeks Pendidikan = Dimensi Pendidikan I Pengeluaran = Indeks Pengeluaran = Dimensi Pengeluaran	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data BPS Kota Dumai tahun 2010-2020	Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Dimensi ini diwakili oleh indikator umur harapan hidup pada waktu lahir. Pertimbangannya adalah umur harapan hidup yang tinggi mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Umur harapan hidup pada waktu lahir diukur dengan tahun. Kesehatan adalah sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat karena merupakan prasyarat bagi produktivitas.	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	Indeks Kesehatan merupakan hasil perhitungan dari Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ , $AHH_{maks} = 85$ , $AHH_{min} = 20$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umum (ASDR)	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Proyeksi dan Data BPS tahun 2010-2020	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Data BPS tahun 2010-2020	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kondisi dari tahun 2010-2020 dan pertimbangan subjektif pada saat penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...		
11. Lingkungan	lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan. Tidak hanya itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan. Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah fasilitas buang air besar, akses terhadap air minum layak, dan jenis lantai terluas	
12. Perilaku kesehatan	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang diterapkan oleh masyarakat mempengaruhi pada kualitas kesehatan individu masyarakat itu sendiri	
13. Pelayanan Kesehatan	ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan. Oleh sebab itu faktor kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus terus diupayakan dalam rangka membangun kesehatan masyarakat	
14. Keturunan		
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.</li> <li>b. Bangunan puskesmas pembantu dan poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak.</li> <li>c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas, Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</li> <li>d. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>e. Masih terdapat Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita terutama di Kecamatan Dumai Barat.</li> <li>f. Adanya <i>triple burden</i> penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD. Disamping itu, munculnya new emerging diseases seperti COVID 19.</li> <li>g. Masih terdapat jumlah kasus balita dengan gizi buruk dan gizi kurang selama periode 2016-2020.</li> <li>h. Masih ada penduduk Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan yang mengakibatkan belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC).</li> <li>i. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.</li> <li>j. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.</li> <li>k. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan di beberapa indikator pelayanan kesehatan tahun 2020 akibat Pandemi Covid 19.</li> </ul>	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	<p>Terdapat RSUD milik Pemko, Milik TNI AD, Milik Polri dan milik Pertamina</p> <p>Terdapat Puskesmas di setiap kecamatan</p> <p>Terdapat Klinik milik Swasta</p> <p>Terdapat Nakes</p>	
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	JKN, Jamkesko, berobat gratis di puskesmas	

## 5. Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi ...	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu	RPJMD 2021 -2026
Tujuan ...	Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera	RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan ...	Indeks Pembangunan Manusia	
Target tahun 2022	74,826	
Target tahun 2023	75,04	
Target tahun 2024	75,254	
Target tahun 2025	75,468	
Target tahun 2026	75,683	
Sasaran strategis ..	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis ...	Indeks Pendidikan	
Target tahun 2022	0,706	Rincian data pada lampiran sasaran 5a
Target tahun 2023	0,709	Rincian data pada lampiran sasaran 5b
Target tahun 2024	0,712	Rincian data pada lampiran sasaran 5c
Target tahun 2025	0,715	Rincian data pada lampiran sasaran 5d
Target tahun 2026	0,718	Rincian data pada lampiran sasaran 5e
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...		RPJMD 2021 -2026
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
6.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
7.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	<p>peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.</p> <p>Tujuan ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pementapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.</p> <p>Tujuan ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .</p> <p>Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya</p>	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$IPM = (\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}) \times 100$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	I Kesehatan = Indeks Kesehatan = Dimensi Kesehatan I Pendidikan = Indeks Pendidikan = Dimensi Pendidikan I Pengeluaran = Indeks Pengeluaran = Dimensi Pengeluaran	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data BPS Kota Dumai tahun 2010-2020	Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah menghitung pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan. Pendidikan memperluas peluang seseorang untuk berkarya. Pendidikan juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}, HLS_{maks} = 18, HLS_{min} = 0$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}, RLS_{maks} = 15, RLS_{min} = 0$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Indeks Pendidikan dihitung dari rata-rata aritmatik indeks HLS dan indeks RLS	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Proyeksi dan Data BPS tahun 2010-2020	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Data BPS tahun 2010-2020	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kondisi dari tahun 2010-2020 dan pertimbangan subjektif pada saat penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...		
15. Kondisi ekonomi	Kondisi ekonomi mempengaruhi Partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah (APS)	
16. Akses menuju	Jarak sekolah dari tempat tinggal bisa mempengaruhi motivasi untuk bersekolah. Di kota Dumai masih terdapat daerah yang terisolir yaitu daerah batu teritip dan sungai geniot	
17. Akses/kesempatan untuk sekolah	Sistem rayonisasi menyebabkan keterbatasan kesempatan untuk anak-anak diluar rayon untuk bersekolah	
18.		
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	a. Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD dan SMP. b. Menurunnya angka melanjutkan pendidikan jenjang Pendidikan SMP. c. Terjadinya peningkatan angka putus sekolah jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs d. Bertambahnya rasio siswa/ruang kelas SD/MI untuk SD sudah melebihi SPM 28 siswa per kelas yaitu 31,13 siswa/kelas tahun 2020	

Kategori	Uraian	Sumber Data
	<p>e. Persentase ruang kelas SD/MI yang dalam kondisi baik masih dibawah 30% di tahun 2020</p> <p>f. Persentase ruang kelas SMP yang dalam kondisi baik masih dibawah 20% di tahun 2020</p> <p>g. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.</p> <p>h. Guru yang bersertifikasi jenjang Pendidikan SD baru mencapai 60,53% dan jenjang Pendidikan SMP sebesar 47,85%.</p> <p>i. Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai.</p>	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Terdapat sekolah negeri di setiap kecamatan Kontribusi pihak swasta dalam dunia pendidikan yang cukup tinggi	
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	Komitmen untuk porsi belanja pendidikan lebih dari 20% Pengangkatan guru honorer untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah	

## 6. Sasaran Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi - 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu	RPJMD 2021 - 2026
Tujuan 2	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	RPJMD 2021 - 2026
Indikator tujuan 2	Indeks Pembangunan Manusia	
Target tahun 2022	74,826	
Target tahun 2023	75,04	
Target tahun 2024	75,254	
Target tahun 2025	75,468	
Target tahun 2026	75,683	
Sasaran strategis 2.3	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	RPJMD 2021 - 2026
Indikator sasaran strategis 2.3	Indeks Pengeluaran	
Target tahun 2022	0,756	
Target tahun 2023	0,759	
Target tahun 2024	0,762	
Target tahun 2025	0,764	
Target tahun 2026	0,767	
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis 2.3	DINAS PERDAGANGAN	RPJMD 2021 - 2026
Penjelasan substansi dari Tujuan 2	<p>Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.</p> <p>Tujuan ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.</p> <p>Tujuan ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk</p>	

Kategori	Uraian	Sumber Data
	menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .	
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan 2.3	$IPM = (\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}) \times 100$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	I Kesehatan = Indeks Kesehatan = Dimensi Kesehatan I Pendidikan = Indeks Pendidikan = Dimensi Pendidikan I Pengeluaran = Indeks Pengeluaran = Dimensi Pengeluaran	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data BPS Kota Dumai tahun 2010-2020	Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis 2.3	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis 2.3 (Indeks Pengeluaran)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan <i>Human Development Report</i> (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis 2.3 (Indeks Pengeluaran)	$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	$Pengeluaran maks = 26.572.352$ $Pengeluaran min = 1.007.436$	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Proyeksi dan Data BPS tahun 2010-2020	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Data BPS tahun 2010-2020	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kondisi dari tahun 2010-2020 dan pertimbangan subjektif pada saat penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis 2.3  (Meningkatnya Standard Hidup Layak	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Masyarakat Kota Dumai)	<p>dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.</p> <p>Dalam penelitian, dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda beberapa variabel hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa yang dianggap dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, yaitu :</p> <p>(1) PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM; (3) Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM; (4) Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM; (5) Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM; (6) PDRB Sektor Pertanian berpengaruh dominan terhadap IPM.</p>	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun		
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun		
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis		

## 7. Sasaran Meningkatnya Penerapan Budaya Melayu

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi ...	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu	RPJMD 2021 -2026
Tujuan ...	Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera	RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan ...	Indeks Pembangunan Manusia	
Target tahun 2022	74,826	
Target tahun 2023	75,04	
Target tahun 2024	75,254	
Target tahun 2025	75,468	
Target tahun 2026	75,683	
Sasaran strategis ..	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis ...	Indeks Pendidikan	
Target tahun 2022	0,706	
Target tahun 2023	0,709	
Target tahun 2024	0,712	
Target tahun 2025	0,715	
Target tahun 2026	0,718	
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...		RPJMD 2021 -2026
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
9.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
10.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
11.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	<p>peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.</p> <p>Tujuan ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai</p>	

Kategori	Uraian	Sumber Data
	<p>dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.</p> <p>Tujuan ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .</p>	
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$IPM = (\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}) \times 100$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	I Kesehatan = Indeks Kesehatan = Dimensi Kesehatan I Pendidikan = Indeks Pendidikan = Dimensi Pendidikan I Pengeluaran = Indeks Pengeluaran = Dimensi Pengeluaran	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data BPS Kota Dumai tahun 2010-2020	Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Budaya Melayu menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan daerah dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	Persentase penerapan 4 Jenis Budaya melayu merupakan indikator untuk mengukur penerapan budaya melayu yang <i>tangible</i> sehingga pengukuran penerapannya dapat dilihat secara langsung oleh stakeholder pembangunan daerah. Adapun 4 budaya melayu yang diukur penerapannya adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pantun pada acara resmi pemerintah daerah</li> <li>2. Busana Melayu lengkap pada hari-hari tertentu</li> <li>3. Bangunan corak melayu (kantor dan toko)</li> <li>4. Bahasa melayu di sekolah dan hari-hari tertentu</li> </ol>	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	$\frac{\sum ((\text{jenis budaya melayu yang diterapkan}))}{4} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pantun</li> <li>2. Busana Melayu lengkap</li> <li>3. Bangunan corak melayu (kantor dan toko)</li> <li>4. Bahasa melayu di sekolah dan hari-hari tertentu</li> </ol>	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Penghitungan penerapan merupakan rata-rata persentase akumulasi penerapan dari ke empat kompone aspek budaya melayu	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Sumber data penetapan target	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kategori	Uraian	Sumber Data
indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun		
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kesepakatan penenrapan 4 jenis budaya melayu pada proses penyusunan RPJMD	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...		
19. globalisasi	Terjadinya peubahan kehidupan sosial karenamasuknya pengaruh kebudayaan luar akibat kemajuan teknologi dan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan budaya melayu di Kota Dumai	
20. Migrasi	Sebagai daerah yang menjadi pintu gerbang Indonesia dan Provinsi Riau di Pantai Timur Sumatera dan daerah industri arus migrasi baik masuk maupun keluar kota Dumai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan budaya melayu di Kota Dumai	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi</li> <li>Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah.</li> <li>Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal.</li> <li>Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah.</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.</li> <li>Minimnya festival kebudayaan di Kota Dumai.</li> <li>Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.</li> <li>Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya.</li> <li>Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untk promosi pariwisata Kota Dumai.</li> <li>Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah.</li> </ol>	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat nya Lembaga Ada Melayu di Kota Dumai</li> <li>Terdapatnya lembaga kerukunan antar suku di kota Dumai</li> </ol>	
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 3 Tahun 2017 tentang lembaga ada melayu riau</li> <li>Penetapa kebudayaan Melayu menjadi roh bagi Pembangunan Kota Dumai melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota DUmai Tahun 2021-2026</li> </ol>	

## 8. Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi ...	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas	RPJMD 2021 -2026
Tujuan ...	Mewujudkan Infrastrktuktur Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan ...	Indeks Infrastruktur Daerah	
Target tahun 2022	52,46	
Target tahun 2023	59,26	
Target tahun 2024	64,41	
Target tahun 2025	69,3	
Target tahun 2026	74,21	
Sasaran strategis ..	Meningkatnya Infrastruktur Kota	RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis ...	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	
Target tahun 2022	60,77	
Target tahun 2023	66,33	
Target tahun 2024	71,18	
Target tahun 2025	75,51	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Target tahun 2026	80,01	
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...		RPJMD 2021 -2026
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
13.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
3.	DINAS PERHUBUNGAN	
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	<p>Tujuan ini untuk mendorong peningkatan kondisi infrastruktur Kota Dumai yang merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (Liveable). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (Investability dan Visitability).</p> <p>Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.</p> <p>Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatkan kesadaran akan kualitas lingkunganhidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah</p>	
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	Indeks Infrastruktur Daerah adalah nilai yang menggambarkan tingkat pelayanan infrastruktur kota, pemanfaatan ruang daerah, kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$\frac{1}{3} \times \text{Meningkatnya infrastruktur Kota} + \frac{1}{3} \times \text{Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten} + \frac{1}{3} \times \text{Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana}$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Rata-rata akumulasi penjumlahan capaian nilai sasaran Meningkatkan infrastruktur Kota, Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Penetapan target berasal dari Dinas PUPR, Perkimtan, Perhubungan, LH, BPBD dan Dinsos PM	
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Capaian Kinerja Dinas PUPR, Perkimtan, Perhubungan, LH, BPBD dan Dinsos PM	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Kota untuk mendukung menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (Liveable) serta menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	nilai yang menggambarkan tingkat pelayanan dari pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum, bidang perkim dan sarana prasaran perhubungan daerah	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	$\frac{1}{3} \times (\text{Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum} + \text{Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman} + \text{Persentase sarana dan prasarana perhubungan})$	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Tingkat pelayanan infrastruktur Ke PU-an Tingkat pelayanan Perkimtan Tingkat pelayanan sarpras perhubungan	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data oleh Perangkat Daerah	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Dinas PUPR, Perkimtan, Perhubungan	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...		
21. Kewenangan daerah	Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai di pengaruhi oleh adanya pemilahan kewenangan yang dimiliki antara daerah, provinsi dan pusat. Disamping hal tersebut masih belum ditetapkannya kewenangan antara Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan terkait penanganan infrastruktur jalan juga mempengaruhi keberhasilan sasaran ini	
22. Luas wilayah/Kondisi geografis	Luasnya wilayah Kota Dumai dan kondisi geografis Kota Dumai mempengaruhi peningkatan infrastruktur daerah	
23. Banjir dan kondisi tanah	Banjir dan kondisi tanah di Kota Dumai mempengaruhi pelayanan infrastruktur daerah di Kota Dumai	
24. Implementasi penegakan rambu-rambu angkutan jalan	Tidak disiplinnya penggunaan jalan (khususnya truk angkutan barang) juga mempengaruhi tingkat pelayanan infrastruktur daerah	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Frekwensi Banjir yang semakin meningkat Tonase kendaraan yang melwati ruas jalan sudah tidak sesuai dengan kapasitas jalan Readiness ciritera yang dipersyaratkan kementerian PUPR belum terpenuhi dalam penanganan banjir sungai dumai	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	✓ Kota Dumai sudah memiliki master plan dan DED penanganan banjir ✓ Kota Dumai sudah memiliki data dasar jalan dan jembatan (DD)	
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	✓ Peningkatan porsi belanja infrastruktur daerah baik dari usulan teknokratik perangkat daerah maupun dari usulan partisipatif dan politis ✓ Koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pelaksanaan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah dalam penanganan infrastruktur di Kota Dumai	

## 9. Sasaran Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi ...	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas	RPJMD 2021 -2026
Tujuan ...	Mewujudkan Infrastrktuktur Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan ...	Indeks Infrastruktur Daerah	
Target tahun 2022	52,46	
Target tahun 2023	59,26	
Target tahun 2024	64,41	
Target tahun 2025	69,3	
Target tahun 2026	74,21	
Sasaran strategis ..	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis ...	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai	
Target tahun 2022	20	
Target tahun 2023	30	
Target tahun 2024	45	
Target tahun 2025	60	
Target tahun 2026	75	
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...		RPJMD 2021 -2026
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
15.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	<p>Tujuan ini untuk mendorong peningkatan kondisi infrastruktur Kota Dumai yang merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (Liveable). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (Investability dan Visitability).</p> <p>Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.</p> <p>Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkunganhidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah</p>	
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	Indeks Infrastruktur Daerah adalah nilai yang menggambarkan tingkat pelayanan infrastruktur kota, pemanfaatan ruang daerah, kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$\frac{1}{3}X$ Meningkatnya infrastruktur Kota)+ $\frac{1}{3}X$ Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten)+ $\frac{1}{3}X$ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana)	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Rata-rata akumulasi penjumlahan capaian nilai sasaran Meningkatnya infrastruktur Kota, Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Penetapan target berasal dari Dinas PUPR, Perkimtan, Perhubungan, LH, BPBD dan Dinsos PM	
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Capaian Kinerja Dinas PUPR, Perkimtan, Perhubungan, LH, BPBD dan Dinsos PM	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Sasaran ini untuk mewujudkan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui Pengendalian Pemanfaatan Ruang Demi Terwujudnya Ruang Yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan sehingga diharapkan masalah-masalah perkotaan seperti banjir, polusi, dan sebagainya bisa di kendalikan. Termasuk pemberian izin sesuai rencana tata ruang, melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menyebar dan pembebasan lahan untuk RTH, serta mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan fungsi ruangnya.	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya dan juga pengurangan permasalahan pertanahan di Kota Dumai	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	$\frac{1}{2}X$ Persentase kesesuaian tata ruang)+ $\frac{1}{2}X$ Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan per tahun)	

Kategori	Uraian	Sumber Data
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Tingkat kesesuaian tata ruang dengan rencana tata ruang Penyelesaian permasalahan sengketa tanah dan lahan di kota Dumai	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data oleh Perangkat Daerah	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Dinas PUPR, Perkimtan	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...		
25. Sosialisasi RTRW	Lemahnya sosialisasi RTRW mempengaruhi pengetahuan dan padrtisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang	
26. Konsistensi penegakan peraturan Perundang-undangan	Kepastian Hukum dalam pemanfaatan ruang belum maksimal, sehingga pelanggaran mengenai RTRW belum ada	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Konflik pemanfaatan ruang/lahan antara masyarakat dengan pola ruang dan pemilik lahan konsesi	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	✓ Kota Dumai sudah memiliki RTRW dan RDTR	
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	✓ Koordinasi dengan Kementerian LHK dan pemilik lahan konsesi	

## 10. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana

Kategori	Uraian				Sumber Data
Misi ...	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas				RPJMD 2021 - 2026
Tujuan ...	Mewujudkan Infrastrktur Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan				RPJMD 2021 - 2026
Indikator tujuan ...	Indeks Infrastruktur Daerah				
Target tahun 2022	52,46				
Target tahun 2023	59,26				
Target tahun 2024	64,41				
Target tahun 2025	69,3				
Target tahun 2026	74,21				
Sasaran strategis ..	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana				RPJMD 2021 - 2026
Indikator sasaran strategis ...	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan persampahan	Penurunan Emisi gas rumah kaca	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	
Target tahun 2022	69,97	57	7.195,43	75	
Target tahun 2023	70,19	63	7.194,06	80	
Target tahun 2024	70,41	69	6.826,22	85	
Target tahun 2025	70,41	75	6.758,14	90	
Target tahun 2026	70,41	81	6.573,53	95	
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis ...					RPJMD 2021 - 2026
16.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
17.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
18.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
19.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
Penjelasan substansi dari Tujuan ...	Tujuan ini untuk mendorong peningkatan kondisi infrastruktur Kota Dumai yang merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (Liveable). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan				

Kategori	Uraian	Sumber Data
	<p>meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (Investability dan Visitability).</p> <p>Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.</p> <p>Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah</p>	
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	Indeks Infrastruktur Daerah adalah nilai yang menggambarkan tingkat pelayanan infrastruktur kota, pemanfaatan ruang daerah, kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	
Rumus Perhitungan Indikator tujuan ...	$\frac{1}{3}X$ Meningkatnya infrastruktur Kota) + $\frac{1}{3}X$ Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten) + $\frac{1}{3}X$ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana)	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Rata-rata akumulasi penjumlahan capaian nilai sasaran Meningkatnya infrastruktur Kota, Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Penetapan target berasal dari Dinas PUPR, Perkimtan, Perhubungan, LH, BPBD dan Dinsos PM	
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Capaian Kinerja Dinas PUPR, Perkimtan, Perhubungan, LH, BPBD dan Dinsos PM	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis ...	Sasaran ini untuk mewujudkan Pelestarian lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Serta untuk mengedepankan Kebijakan penanganan kebencanaan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya suatu kebencanaan alam.	
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikanesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu</li> <li>• Cakupan pelayanan persampahan menggambarkan pelayanan pengangkutan sampah di kota Dumai</li> <li>• Penurunan Emisi gas rumah kaca menggambarkan pembangunan ekonomi dan sosial yang meminimalkan penggunaan gas rumah kaca sebagai upaya peningkatan pembangunan berkelanjutan.</li> <li>• Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani menggambarkan upaya penanganan e bencana yang terjadi dikota Dumai</li> </ul>	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	<p>IKLH: (30%<math>\times</math>IP udara) + (30%<math>\times</math>Ip air) + (40%<math>\times</math> tutupanlahan (hutan))</p> <p>Cakupan Pelayanan Persampahan = <math>\frac{\text{Luas Wilayah yang dilayani}}{\text{total luas wilayah}} \times 100\%</math></p> <p>CO<sub>2</sub>= Activity Unit x <math>\frac{\text{CO}_2}{\text{Activity Unit}}</math></p> <p><math>\frac{\text{Luas Wilayah manajemen bencana}}{\text{Luas Wilayah Kota Dumai}} \times 100\%</math></p>	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP air adalah salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air</li> </ul>	

Kategori	Uraian	Sumber Data
(untuk perhitungan realisasi)	<p>sungai (PIj) digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO ) dan nitrogen dioksida (NO ).Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar sertabahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.</li> <li>• Nilai IKTL menggambarkan nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan</li> <li>• Bencana yang di jadikan ukuran adalah Banjir,Karhutla,Kebakaran perkotaan,Puting beliung</li> </ul>	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data oleh Perangkat Daerah	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Dinas LH, BPBD dan Dinas Sosial PM	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...		
Peningkatan jumlah penduduk	Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan aktivitas ekonomi untuk keberlangsungan kehidupan secara umum. Aktivitas tersebut akan memicu seperti kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan untuk membuka lahan, penebangan liar, penggunaan zat kimia lain untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat dan munculnya sampah2 sebagai residu dari kegiatan ekonomi masyarakat	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Sebagai daerah industri potensi pencemaran udara dan air masih cukup tinggi Penggunaan energi untuk transportasi, penanganan sampah dan limbah yang belum optimal, penggunaan pupuk yang belum diatur dan pembukaan lahan belum di kontrol secara optimal.	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kota Dumai sudah melaporkan pencapaian SDGs Kota Dumai	
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	Kota Dumai pernah membuat Kajian KLHS untuk penyusunan RPJMD	

## 11. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik	RPJMD 2021 -2026
Tujuan 4	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	RPJMD 2021 -2026
Indikator tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi	
Target tahun 2022	CC	
Target tahun 2023	B	
Target tahun 2024	B	
Target tahun 2025	B	
Target tahun 2026	B	
Sasaran strategis 4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	RPJMD 2021 -2026
Indikator sasaran strategis	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tiap Tahun	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Indeks Manajemen Risiko</p>
Target tahun 2022	WTP	<p>B</p> <p>2</p>

Kategori	Uraian			Sumber Data
Target tahun 2023	WTP	B	3	
Target tahun 2024	WTP	B	3	
Target tahun 2025	WTP	B	3	
Target tahun 2026	WTP	B	3	
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis 4.1				RPJMD 2021 -2026
1.	INSPEKTORAT			
2.	BAPPEDALITBANG			
3.	BAPENDA			
4.	BPKAD			
Penjelasan substansi dari Tujuan 4	<p>Tujuan ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.</p> <p>Berdasarkan tujuan diatas, maka taglines pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah Kota IDAMAN yang merupakan akronim dari kota tujuan Investasi yang berDaya saing dengan pemerintahan. Amanah yang didukung oleh masyarakat Mandiri dan berAdab serta lingkungan yang Nyaman.</p>			
Definisi operasional dari Indikator tujuan 4	<p>Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.</p>			
Rumus Perhitungan Indikator tujuan 4	<p>Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Indeks Manajemen Resiko</p>			
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	<p>Opini BPK terhadap laporan keuangan digunakan berdasarkan Audit BPK atas LKPD tahunan</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah digunakan berdasarkan penilaian Kemenpan RB</p> <p>Indeks Manajemen Resiko berdasarkan Penilaian BPKP</p>			
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan rumus indicator diluar tujuan			Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Publikasi BPS			
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)			
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis	Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tiap Tahun merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Audit BPK atas LKPD tahunan</li> <li>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah suatu perhitungan nilai dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan</li> </ul>			

Kategori	Uraian	Sumber Data
	<p>pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Manajemen Risiko merupakan Index yang digunakan untuk mengukur efektivitas Manajemen Risiko di suatu pemerintahan daerah berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan terkait dengan Strategi, Operasional, Pelaporan, dan Kepatuhan.</li> </ul>	
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tiap Tahun → Hasil Opini BPK</li> <li>• Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah → Penilaian Kemenpan RB</li> <li>• Indeks Manajemen Risiko → Penilaian BPKP</li> </ul>	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tiap Tahun : berdasarkan audit BPK atas LKPD tahunan</li> <li>• Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah : berdasarkan Penilaian Kemenpan RB</li> <li>• Indeks Manajemen Risiko : berdasarkan Penilaian BPKP</li> </ul>	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Publikasi BPS	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Publikasi BPS	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis		
Ketaatan peraturan perundang – undangan	Ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	
Penerapan akuntansi sektor publik		
Kualitas laporan keuangan		
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	<p>Opini BPK → OPD tidak sungguh- sungguh menyelesaikan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tiap Tahun</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah → Kepala Perangkat Daerah tidak memahami dan menguasai kinerja Daerah dan Perangkat Daerah; Kualitas perencanaan pemda belum memadai; Hanya sebatas pemenuhan dokumen saja, belum termasuk untuk memenuhi kualitas substansi dokumen; PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum disosialisasi kan kepada APIP sehingga persepsi evaluator berbeda-beda</p> <p>Indeks Manajemen Risiko → SDM yang terlibat dalam penyusunan peta risiko bukan yang memahami konsep dan substansi risiko &amp; Pemilik risiko belum merasa perlu dalam menyusun risiko</p>	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun		
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis	<p>Opini BPK &amp; Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah → Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 II-238 daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).</p>	

## 12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kategori	Uraian	Sumber Data
Misi – 4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik	RPJMD 2021 -2026
Tujuan 4	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	RPJMD 2021 -2026

Kategori	Uraian		Sumber Data																				
Indikator tujuan 4	Indeks Reformasi Birokrasi																						
Target tahun 2022	CC																						
Target tahun 2023	B																						
Target tahun 2024	B																						
Target tahun 2025	B																						
Target tahun 2026	B																						
Sasaran strategis 4.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		RPJMD 2021 -2026																				
Indikator sasaran strategis 4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Layanan SPBE																					
Target tahun 2022	81	2,83																					
Target tahun 2023	81	2,85																					
Target tahun 2024	82	2,9																					
Target tahun 2025	82	2,96																					
Target tahun 2026	82	3																					
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis 4.2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		RPJMD 2021 -2026																				
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																						
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI																						
Penjelasan substansi dari Tujuan 4.2	<p>Tujuan ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.</p> <p>Berdasarkan visi dan misi diatas, maka taglines pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah Kota IDAMAN yang merupakan akronim dari kota tujuan Investasi yang berDaya saing dengan pemerintahan Amanah yang didukung oleh masyarakat Mandiri dan berAdab serta lingkungan yang Nyaman.</p>																						
Definisi operasional dari Indikator tujuan ...	<p>Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.</p>																						
Rumus Perhitungan Indikator tujuan 4.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai/ Angka</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>&gt;90-100</td> <td>Istimewa</td> <td>Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>&gt;80-90</td> <td>Sangat Baik</td> <td>Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>&gt;70-80</td> <td>Baik</td> <td>Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.</td> </tr> </tbody> </table>			No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi	1	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.	2	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.	3	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi																			
1	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.																			
2	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.																			
3	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.																			

Kategori	Uraian					Sumber Data
	4	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.	
	5	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.	
	6	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.	
	7	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan indikator masing masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020.					
Data rinci penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Hasil pengolahan Data BPS Kota Dumai tahun 2010-2020					Kertas kerja tim penyusun RPJMD Kota Dumai
Sumber data penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	publikasi BPS					
Dasar pertimbangan penetapan target indikator tujuan untuk 5 tahun	Konsep pesimis, optimis, moderat dan subjektif. Yang digunakan dalam target adalah konsep moderat dan subjektif berupa yang terjadi pada saat proses penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)					
Penjelasan substansi dari Sasaran Strategis 4.2	Data Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.					
	SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.					
Definisi operasional dari Indikator Sasaran Strategis ...	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memuat data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya					
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.					
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	$IKM = \sum ((nilai\ 9\ unsur : total\ responden) \times \left(\frac{1}{9}\right) \times 25)$					
Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Strategis ...	SPBE = Hasil analisa terhadap : 1. Domain Kebijakan SPBE					

Kategori	Uraian	Sumber Data
	1) Aspek Tata kelola (7 indikator) 2) Aspek Kebijakan layanan 10 indikator 2. Domain Tata kelola SPBE 1) Aspek kelembagaan (2 indikator) 2) Aspek Strategi dan perencanaan (2 indikator) 3) Aspek TIK (3 indikator) 3. Domain layanan SPBE 4) Aspek layanan administrasi PBE (7 indikator) Aspek layanan publik BE (4 indikator)	
Penjelasan setiap komponen rumus dan sumber datanya (untuk perhitungan realisasi)	25 = nilai dasar konversi 9 unsur penilaian : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu pelayanan 4. Biaya/tarif 5. Produk layanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana Prasarana 9. Penanganan Pengaduan	
Data rinci penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Proyeksi dan Data BPS tahun 2010-2020	
Sumber data penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Data BPS tahun 2010-2020	
Dasar pertimbangan penetapan target indikator Sasaran Strategis untuk 5 tahun	Kondisi dari tahun 2010-2020 dan pertimbangan subjektif pada saat penyusunan RPJMD (pandemi Covid 19)	
Faktor penentu keberhasilan sasaran strategis ...	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yakni aspek kesederhanaan (prosedur pelayanan yang berbelit-belit), aspek kejelasan (adanya transparansi biaya yang dikeluarkan), aspek akurasi (urusan sesuai dengan yang dikehendaki), aspek keamanan (bukti tanda terima diberikan), dan aspek kemudahan akses (jarak lokasi kantor dengan tempat tinggal dan ketersediaan angkutan umum menuju lokasi kantor)	
1. Faktor organisasi struktur organisasi	Kualitas pelayanan publik pada pemerintah salah satunya bergantung pada komponen – komponen pembentuknya. Kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja, dan tingkat jabatan. Komponen formalisasi berkaitan dengan standard operating procedure (SOP). Terakhir, sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan.	
2. Faktor Aparat/ pelayan publik	Kemampuan aparat pemerintah berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.	
3. Faktor sistem pelayanan publik	Sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.	
Permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun	IKM : 1. Layanan administrasi masyarakat tersebar di beberapa tempat 2. Pelayanan masih bersifat birokratif 3. Integritas ASN pada OPD Pelayanan belum memadai SPBE :	
	1. Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam penerapan SPBE 2. Belum terlaksananya tata kelola SPBE yg terpadu 3. Pedoman atau kebijakan SPBE tidak dilaksanakan 4. Terbatasnya kompetensi SDM SPBE dan ego sektoral perangkat daerah 5. Belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu.	
Kekuatan yang diidentifikasi sebelumnya yang terkait Sasaran Strategis untuk 5 tahun		

Kategori	Uraian	Sumber Data
Upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait Sasaran Strategis		

## B. Uraian 10 (Sepuluh) Risiko Tertinggi

### 1. Risiko kurangnya kemandirian usaha UMKM dan IKM sehingga kualitas produknya belum mampu berdaya saing dengan industri lainnya

Risiko kurangnya kemandirian usaha UMKM dan IKM sehingga kualitas produknya belum mampu berdaya saing dengan industri lainnya *kemungkinan besar* terjadi dan memiliki dampak sebagai berikut:

- a. Kurangnya pendapatan pelaku usaha;
- b. Kurangnya minat masyarakat (pembeli) terhadap produk IKM dan UMKM;
- c. Rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang tidak dimungkinkan melebihi pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun pada tahun 2010-2020;
- d. Tidak ada penambahan nilai produks/kontribusi di sektor IKM;
- e. Produk UMKM tidak mampu mendukung kebutuhan industri besar dalam pemenuhan standar perusahaan.

Risiko ini disebabkan oleh:

- a. MoU dengan industri besar lainnya dalam hal penggunaan produk IKM dan UMKM belum ada;
- b. Kurangnya akses modal ke lembaga keuangan dan kurangnya modal yang diperoleh dari Koperasi dibandingkan lembaga keuangan;
- c. Kurangnya promosi dan pemasaran;
- d. Kurangnya kemasan produk;
- e. Kurangnya inovasi produk;
- f. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM;
- g. Legalitas usaha kurang maksimal berupa izin edar, label halal, izin BPOM, SNI.

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikatornya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK, Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB, PDRB Perkapita ADHK, dan PDRB Perkapita ADHB.

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah promosi dengan keikutsertaan dalam pameran ditingkat nasional. Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu Produk yang ditampilkan dalam pameran tidak melalui seleksi yang memberikan nilai tambah produk.

Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang *sangat tinggi (24)*.

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah:

- a. Memperkuat dukungan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
- b. Memantapkan kelembagaan pelaku usaha untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan daya saing produk usaha
- c. Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
- d. Bantuan Modal Usaha Untuk UMKM Rintisan Pemasaran dengan E-Commerce
- e. Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai dengan memfungsikan 4 rumah terampil di Dumai Timur, Sungai Sembilan, Medang Kampai, dan Bukit Kapur

- f. Pengembangan potensi pemuda melalui pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha

Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu Triwulan I 2023 sampai dengan Tahun 2024

2. Risiko Terbatasnya peluang kesempatan kerja dan berwirausaha di Kota Dumai  
Risiko Terbatasnya peluang kesempatan kerja dan berwirausaha di Kota Dumai *mungkin* terjadi dan memiliki dampak Menurunnya tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Risiko ini disebabkan oleh :

1. Masih adanya ketidaksesuaian data yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI dengan data yang diusulkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
2. Database masyarakat miskin belum memberikan informasi yang lengkap terkait kondisi kemiskinannya.
3. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait program pengentasan kemiskinan.

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikatornya Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan.

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah :

1. Sosialisasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Perwako No. 37 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
2. Pelatihan kepada Angkatan Kerja

Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu

1. Pelatihan Angkatan Kerja belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja.
2. Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Perwako No. 37 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal. tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang *tinggi (17)*.

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah :

1. Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai dengan memfungsikan 4 rumah terampil di Dumai Timur, Sungai Sembilan, Medang Kampai, dan Bukit Kapur
2. Pengembangan potensi pemuda/ Angkatan Kerja melalui pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha
3. Mengembangkan dan Memperbanyak Usaha yang Menyerap banyak tenaga Kerja
4. Pengembangan Potensi Pemuda Melalui Pelatihan Sesuai dengan Kompetensi dan Kebutuhan Dunia Usaha

Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2023 sampai dengan 2026 dan untuk rumah terampil dilaksanakan hanya 1 rumah pertahun.

3. Risiko Belum meratanya ketersediaan pangan

Risiko Belum meratanya ketersediaan pangan *kemungkinan besar* terjadi dan memiliki dampak Tidak seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangannya.

Risiko ini disebabkan oleh :

1. Ketergantungan supply dari daerah lain diantaranya masih tingginya ketergantungan impor pangan (Rohil sebagai penyangga ketahanan pangan Kota Dumai)
2. Kapasitas Produksi Kota Dumai sangat rendah (rasio produksi pangan yang hanya dua surplus dari 14 sumber pangan)
3. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang)

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan indikatornya Skor Pola Pangan Harapan (Kualitas Konsumsi Pangan) dan Ketersediaan Pangan Utama

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah :

1. Penyuluhan dan Pendampingan kepada kelompok tani penghasil pangan utama
2. Peningkatan produktivitas tanaman baik pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan promosi dengan keikutsertaan dalam pameran ditingkat nasional.

Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu Penyuluhan dan pendampingan belum dijalankan maksimal oleh kelompok tani.

Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang *sangat tinggi (24)*.

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah :

1. Penetapan peraturan terkait alih fungsi lahan pertanian
2. Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah

Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026

#### 4. Risiko Menurunnya kualitas hidup masyarakat

Risiko Menurunnya kualitas hidup masyarakat  *mungkin* terjadi dan memiliki dampak Meningkatnya mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan).

Risiko ini disebabkan oleh :

1. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan akibat pandemi COVID-19
2. Sarana prasarana layanan kesehatan belum merata dan memadai
3. Kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan yang masih belum merata dan mencukupi
4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Dumai belum tercapai
5. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikatornya Indeks Kesehatan

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah Upaya preventif, promotif (penyuluhan), kuratif, seperti:

1. Pelayanan gizi masyarakat
2. Pemberian makanan tambahan
3. Ambulance 24 jam di tingkat Kecamatan
4. Membantu Premi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak
5. Memberikan kemudahan layanan di Puskesmas dan RSUD Kota Dumai

Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu Masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya kesehatan. Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang moderat (14).

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama untuk pelaksanaan pencapaian Standar pelayanan Minimal diantaranya pengembangan Puskesmas Rawat Inap di Daerah yang jauh dari Kota.
2. memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan memperluas cakupan UHC

Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026

#### 5. Risiko Rendahnya minat dan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Risiko Rendahnya minat dan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan *kemungkinan besar* terjadi dan memiliki dampak

1. Menurunnya kualitas dan kuantitas peserta didik
2. Meningkatnya angka putus sekolah

Risiko ini disebabkan oleh

1. Belum terpenuhi kebutuhan sarana prasarana yang layak, memadai dan merata di bidang pendidikan
2. Biaya sekolah yang tinggi, khususnya biaya TK Swasta
3. Banyaknya jumlah sarana prasarana layanan pendidikan yang rusak, khususnya dalam akses jalan menuju sekolah
4. Kesulitan memperoleh lahan untuk pembangunan sekolah
5. Masih adanya pemberlakuan hukuman di sekolah
6. Kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA)
7. Masih adanya kasus kekerasan pada peserta didik
8. Minimnya SDM psikolog/konselor

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikatornya Indeks Pendidikan.

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah

1. Menginput data sarpras pada aplikasi DAPODIK sesuai kondisi riil dalam rangka pemetaan pembangunan layanan pendidikan
2. Penerapan sistem zonasi
3. Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
4. Penjangkauan kasus bersama psikolog/konselor
5. Koordinasi dengan sektor internal dan eksternal

Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu

1. Penyampaian data sarpras yang diinput pada aplikasi DAPODIK tidak sesuai dengan kondisi riil
2. Tidak tertampungnya peserta didik khususnya di wilayah perkotaan
3. Masih rendahnya pemahaman peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap pentingnya pendidikan

Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang tinggi (19).

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah :

1. Meningkatkan prioritas pembangunan jalan ke sekolah
2. Rekrutmen tenaga psikolog/konselor penanganan Kekerasan Anak

Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026

6. Risiko Kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan barang penting  
Risiko Kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan barang penting *kemungkinan besar* terjadi dan memiliki dampak Daya beli masyarakat atas bahan pokok dan barang penting menurun.  
Risiko ini disebabkan oleh
1. Kurangnya ketersediaan bahan pokok masyarakat dan barang penting
  2. Resesi global

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai dengan indikatornya Indeks Pengeluaran.

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Pengawasan terhadap distributor. Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu Stok barang tetap tersedia.

Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang *tinggi* (19).

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah :

1. Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi produksi lokal bahan pokok masyarakat dan barang penting
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
3. Memaksimalkan tugas tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026

7. Risiko Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya melayu Kota Dumai  
Risiko Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya melayu Kota Dumai *kemungkinan besar* terjadi dan memiliki dampak Hilangnya identitas melayu di Kota Dumai  
Risiko ini disebabkan oleh
1. Kemajemukan/kebergaman masyarakat di Kota Dumai
  2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi untuk penerapan tentang eksistensi budaya melayu
  3. Kurangnya pelestarian budaya melayu sebagai identitas budaya Kota Dumai

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Meningkatnya Penerapan Budaya Melayu dengan indikatornya Persentase Penerapan 4 Jenis Budaya Melayu

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah

1. Perwako tentang Penerapan Budaya Melayu di Lingkungan Kota Dumai no. 79 tahun 2021 di perundangkan tahun 2022
2. Melaksanakan kegiatan yang dapat melestarikan kebudayaan melayu melalui pertunjukan seni

Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu Ketidakpedulian masyarakat dalam berbudaya melayu sebagai identitas budaya di Kota Dumai

Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang *moderat* (16).

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah Penerapan muatan budaya melayu riau di ruang umum  
Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026

8. Risiko Jalan akses untuk aktivitas masyarakat diantaranya sekolah, perkantoran, pasar, dan fasilitas kesehatan yang beririsan dengan aktivitas industri.  
Risiko alan akses untuk aktivitas masyarakat diantaranya sekolah, perkantoran, pasar, dan fasilitas kesehatan yang beririsan dengan aktivitas industri *kemungkinan kecil* terjadi dan memiliki dampak
1. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas
  2. Terganggunya produktivitas masyarakat dan industri

Risiko ini disebabkan oleh

1. Keterbatasan anggaran
2. Keterbatasan kewenangan terkait kawasan hutan

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota dengan indikatornya Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah  
Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah

1. Pemeliharaan jalan provinsi
2. Pengawasan oleh Dishub
3. Pembatasan waktu bagi kendaraan industri untuk beroperasi
4. Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTRW 2019-2039
5. Melaksanakan penyusunan AMDAL
6. Penyusunan perda terkait tonase kendaraan industri (crosscutting dengan Dishub)

Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu Belum tertibnya kendaraan industri yang melintasi jalan akses sesuai jadwal pembatasan waktu dan aturan tonase kendaraan (ODOL).

Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang *sangat tinggi* (21).

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah

Mewujudkan akses jalan lingkaran luar (outer ringroad) melalui upaya:

1. Pengusulan Jalan Outer Ringroad terdiri atas 3 (tiga) segmen melalui APBN maupun Investor
  2. Pengusulan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di KLHK
  3. Pengadaan patok batas jalan (crosscutting dengan Bidang Pertanahan Perkim)
- Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024

9. Risiko Lambatnya penyelesaian sengketa tanah di Kota Dumai terkait kawasan hutan dan kawasan BMN

Risiko Lambatnya penyelesaian sengketa tanah di Kota Dumai terkait kawasan hutan dan kawasan BMN *mungkin* terjadi dan memiliki dampak Belum adanya kepastian kepemilikan tanah di masyarakat dan Pemko.

Risiko ini disebabkan oleh Terbatasnya kewenangan Kota dalam mengatasi konflik pertanahan akibat regulasi yang membatasi kewenangan Pemko Dumai

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten dengan indikatornya Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Aturan

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah Melakukan upaya sosialisasi/mediasi terhadap pihak yang bersengketa/ berkonflik sesuai kewenangan Pemko Dumai

Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu Hasil sosialisasi/ mediasi belum dapat menyelesaikan permasalahan secara maksimal  
Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang *Moderat* (14).

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah Koordinasi Walikota dengan internal pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta pihak lainnya.  
Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

10. Risiko Terjadinya kebakaran yang tidak dapat diprediksi (KLB/force majeure)  
Risiko Terjadinya kebakaran yang tidak dapat diprediksi (KLB/force majeure) *kemungkinan besar* terjadi dan memiliki dampak Terlambatnya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan  
Risiko ini disebabkan oleh
1. Perilaku masyarakat untuk membakar lahan secara sengaja
  2. Belum terimplementasi ke masyarakat secara luas atas sistem pendeteksi kebakaran melalui satelit (aplikasi sipeka)

Penilaian tingkat risiko ini ada pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Cakupan Pelayanan Persampahan, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani.

Pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah

1. koordinasi lintas sektoral daerah dan pusat
2. kendaraan operasional mesin pompa perahu karet
3. sosialisasi karhutla kepada pelaku industri dan masyarakat

Namun masih terdapat celah/kelemahan pengendaliannya yaitu Tidak berjalannya sistem manajemen resiko yang terintegrasi dengan proses perencanaan strategis.  
Risiko ini harus dilakukan pengendalian mengingat tingkat risiko residualnya yang *tinggi* (19).

Rencana tindak pengendalian tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut adalah Pembangunan posko-posko di beberapa titik rawan bencana.  
Keseluruhan rencana tindak pengendalian tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

## BAB IV INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Media informasi dan komunikasi atas rencana tindak pengendalian yang direncanakan adalah dalam bentuk surat edaran Walikota dan sosialisasi/rapat intern Walikota kepada Perangkat Daerah terkait atas pemberlakuan penilaian risiko ini. Hal ini dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian tersebut mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Pelaksanaan surat edaran Walikota dan sosialisasi/rapat intern Walikota direncanakan pada Triwulan I (satu) setiap tahunnya dan dimulai pada tahun 2023.

## BAB V PEMANTAUAN

Media monitoring dan evaluasi risiko dan rencana tindak pengendalian akan dilaksanakan dalam bentuk penyampaian pencatatan kejadian risiko dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian (Form 16) oleh perangkat daerah terkait kepada Walikota Dumai melalui Kepala Bappedalitbang setiap semester. Selain itu pemantauan juga akan dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terpisah oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai.

## BAB VI PENUTUP

Pemerintah Kota Dumai telah menyusun Penilaian Risiko Strategis Pemerintah Kota Dumai untuk jangka waktu 2023 – 2026 atas RPJMD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Penilaian Risiko Strategis Pemerintah Kota Dumai seluruhnya sebanyak 57 risiko. Namun hanya 56 risiko yang yang ditetapkan rencana tindak pengendaliannya sebanyak RTP karena merupakan risiko yang penting menurut Walikota Dumai sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Walikota Dumai.

LAMPIRAN I :

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : 2023 - 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan 1 : Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi								
	Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Kurangnya kemandirian usaha UMKM dan IKM sehingga kualitas produknya belum mampu berdaya saing dengan industri lainnya	RSP.22.17.01.01	Walikota	1. MoU dengan industri besar lainnya dalam hal penggunaan produk IKM dan UMKM belum ada 2. Kurangnya akses modal ke lembaga keuangan dan kurangnya modal yang diperoleh dari Koperasi dibandingkan lembaga keuangan 3. Kurangnya promosi dan pemasaran 4. Kurangnya kemasan produk 5. Kurangnya inovasi produk 6. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM 7. Legalitas usaha kurang maksimal berupa izin edar, label halal, izin BPOM, SNI 8. Pelaku industri belum memiliki business plan	1. Internal 2. Eksternal	1. C 2. UC	1. Kurangnya pendapatan pelaku usaha 2. Kurangnya minat masyarakat (pembeli) terhadap produk IKM dan UMKM 3. Rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang tidak dimungkinkan melebihi pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun pada tahun 2010-2020 4. Tidak ada penambahan nilai produks/kontribusi di sektor IKM 5. Produk UMKM tidak mampu mendukung	Pelaku industri dan Pemerintah Kota Dumai

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						9. Kurangnya informasi/promosi keberadaan wilayah kawasan industri di Kota Dumai 10. Belum adanya rencana pemanfaatan lahan dan rencana induk penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri untuk mempermudah akses kegiatan industri. 11. Terdapat ketidak sempurnaan dalam penetapan zonasi BWP di dalam dokumen RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai 2021-2041 sehingga terkendalanya proses perizinan di beberapa lokasi di Kawasan Industri di Kota Dumai			kebutuhan industri besar dalam pemenuhan standar perusahaan 6. Tidak ada ekspansi ekonomi 7. Peningkatan investasi di kawasan industri yang rendah	
		2 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB								
		3 PDRB Perkapita ADHK	Kurangnya transaksi ekonomi pada koperasi	RSP.22.17.01.02	Walikota	1. 37,50% koperasi belum aktif 2. SDM koperasi yang kurang memadai 3. Keterbatasan modal 4. Pengurus koperasi menjadikan koperasi sebagai pekerjaan sampingan 5. Tidak adanya pengembangan usaha	1. Eksternal 2. Eksternal 3. Eksternal 4. Eksternal 5. Eksternal	1. UC 2. UC 3. UC 4. UC 5. UC	Rendahnya kontribusi koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Masyarakat
		4 PDRB Perkapita ADHB	Program pemerintah yang dijalankan terkait pengembangan pelaku usaha mengalami tumpang tindih	RSP.22.17.01.03	Walikota	Kurangnya komunikasi dan kolaborasi instansi terkait sebagai pembina pelaku usaha (ego sektoral)	1. Internal	1. C	Pelaku usaha tidak dapat terfasilitasi dengan tepat dan sesuai kebutuhan	Pelaku usaha

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			dan tidak terarah							
			Rendahnya realisasi ekspor perdagangan	RSP.22.30.01.04	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya promosi dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan daerah</li> <li>2. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal yang berorientasi ekspor</li> <li>3. Mindset pelaku usaha kecil bahwa yang bisa eksport hanya pengusaha besar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internal</li> <li>2. Internal</li> <li>3. Eksternal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C</li> <li>2. C</li> <li>3. UC</li> </ol>	Menurunnya PDRB Kota Dumai	Pelaku Usaha
			Panjangnya jalur distribusi	RSP.22.30.01.05	Walikota	Tidak tersentralnya jalur distribusi	Internal dan Eksternal	UC	inflasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat (Konsumen)</li> <li>2. Pelaku Usaha (Distributor)</li> </ol>
			Penimbunan barang tidak terkendali	RSP.22.30.01.06	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya data distributor</li> <li>2. Penyimpanan barang di gudang tidak terdaftar</li> </ol>	Eksternal	UC	inflasi	Masyarakat (Konsumen)
			Penumpukan stock inventori tertahan dalam waktu yang menjadikan inventori menurun kualitasnya	RSP.22.30.01.07	Walikota	Masalah global diantaranya Pandemi covid-19 menyebabkan barang yang sudah diproduksi ditahan di pelabuhan karena Pelabuhan Negara Tujuan ditutup	Eksternal	UC	Penambahan biaya produksi lain untuk dapat mempertahankan kualitas Hasil produksi	Pelaku Usaha

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Menurunnya PAD	RSP.22.37.01.08	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalan potensi Pajak Daerah belum optimal</li> <li>2. Penurunan kondisi ekonomi akibat kondisi bencana alam/non alam</li> <li>3. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (WP) untuk membayar Pajak Daerah</li> <li>4. Rendahnya kontribusi PDRB melalui Pengeluaran Pemerintah daerah</li> <li>5. Pemberian insentif pajak daerah bagi WP untuk kemudahan berinvestasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internal</li> <li>2. Eksternal</li> <li>3. Eksternal</li> <li>4. Eksternal</li> <li>5. Internal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C</li> <li>2. UC</li> <li>3. UC</li> <li>4. UC</li> <li>5. C</li> </ol>	Anggaran Belanja Pemerintah Daerah menurun	Walikota dan Masyarakat
	Sasaran 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Gini								
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	Terbatasnya peluang kesempatan kerja dan berwirausaha di Kota Dumai	RSP.22.07.01.09		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kompetensi/ keahlian pencari kerja</li> <li>2. Terbatasnya pertumbuhan industri baru/investasi baru</li> <li>3. adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksternal</li> <li>2. Eksternal</li> <li>3. Eksternal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UC</li> <li>2. UC</li> <li>3. UC</li> </ol>	Menurunnya tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masyarakat
		3 Tingkat Kemiskinan	Ketimpangan pembangunan antar wilayah	RSP.22.07.01.10	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses ke lokasi yang sulit</li> <li>2. Status lahan di kawasan hutan dan tanah konsensi</li> </ol>	Eksternal	UC	Masyarakat minim fasilitas dalam menggerakkan ekonominya	Masyarakat
			Pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran termasuk Program pemerintah tidak menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat miskin sesuai	RSP.22.06.01.11	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya ketidaksesuaian data yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI dengan data yang diusulkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai</li> <li>2. Database masyarakat miskin belum memberikan informasi yang lengkap terkait kondisi kemiskinannya</li> </ol>	Eksternal	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangkauan masyarakat prasejahtera yang dapat dicukupi kehidupannya secara seimbang menjadi terbatas</li> <li>2. Bantuan yang diberikan tidak maksimal memperbaiki kondisi kemiskinan masyarakat tersebut</li> </ol>	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			dengan kondisi kemiskinannya			3. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait program pengentasan kemiskinan				
			Potensi Kelompok rentan miskin jatuh menjadi miskin	RSP.22.06.01.12	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya pandemi atau kejadian luar biasa pada kelompok rumah tangga rentan miskin</li> <li>2. Kepala Keluarga atau yang menjadi tulang punggung keluarga tidak bisa menghasilkan pendapatan bagi keluarganya</li> <li>3. Rendahnya kapasitas anggota Keluarga Rentan Miskin</li> <li>4. Peningkatan harga pangan dan non pangan</li> </ol>	Eksternal	UC	Menambah angka kemiskinan	Masyarakat; Walikota
	Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1 Skor Pola Pangan Harapan (Kualitas Konsumsi Pangan)	Persepsi masyarakat bahwa makan ikan tidak menarik	RSP.22.25.01.13	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan</li> <li>2. Belum berkembangnya teknologi pengolahan / pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen</li> <li>3. Sarana pemasaran, pengolahan, dan distribusi masih terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas (masih secara konvensional)</li> </ol>	Eksternal	C	Tidak tercukupinya kebutuhan gizi hewani (ikan) pada masyarakat	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Rendahnya ketersediaan pangan di Kota Dumai	RSP.22.25.01.14	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan kepada konsumen (ex: pasar, stok es, cool storage)</li> <li>2. Keterbatasan wilayah penangkapan yang menyatu dengan jalur pelayaran</li> <li>3. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tari (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia</li> <li>4. Belum adanya peraturan pemerintah tentang praktik perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keberlanjutan dan kualitas ikan</li> <li>5. Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional</li> <li>6. Sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya</li> <li>7. Kurangnya pemahaman terhadap aspek gizi</li> <li>8. Harga komoditi pangan yang mahal</li> </ol>	Internal, Eksternal	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesulitan masyarakat dalam memperoleh ikan</li> <li>2. Tidak terpenuhinya keberagaman kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat</li> </ol>	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		2 Ketersediaan Pangan Utama	1. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan 2. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar	RSP.22.25.01.15	walikota	1. Minimnya ketersediaan benih yang berkualitas 2. Sulitnya mengubah pola pikir masyarakat dalam mengembangkan usaha produk unggulan 3. banyaknya regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah menjadikan masyarakat enggan menekuni sektor perikanan budidaya 4. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan 6. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan.	1. Internal 2. Eksternal 3. Internal 4. Internal 5. Internal 6. Eksternal	1. C 2. UC 3. C 4. C 5. C 6. UC	1. Produk yang dimiliki tidak memiliki daya saing/ nilai jual yang tinggi 2. Kota Dumai tidak memiliki diversifikasi produk olahan perikanan	Walikota, Dinas Perikanan dan pelaku usaha perikanan
			Belum meratanya ketersediaan pangan	RSP.22.27.01.16	Walikota	1. Ketergantungan supply dari daerah lain diantaranya masih tingginya ketergantungan impor pangan (Rohil sebagai penyangga ketahanan pangan Kota Dumai) 2. Kapasitas Produksi Kota Dumai sangat rendah (rasio produksi pangan yang hanya dua surplus dari 14 sumber pangan) 3. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang)	1. Internal, 2. Internal 3. Internal 4. Eksternal	1.C 2. C 3. C 4. UC	Tidak seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangannya	Walikota, Masyarakat



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Kesehatan	Menurunnya kualitas hidup masyarakat	RSP.22.02.01.19	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan akibat pandemi COVID-19</li> <li>2. Sarana prasarana layanan kesehatan belum merata dan memadai</li> <li>3. Kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan yang masih belum merata dan mencukupi</li> <li>4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Dumai belum tercapai</li> <li>5. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal</li> </ol>	Internal dan eksternal	C/UC	Meningkatnya mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan)	Masyarakat
	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Pendidikan								
			Kualitas SDM/GTK (Guru Tenaga Kependidikan) masih rendah	RSP.22.01,38.01.20	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyaknya guru yang belum tersertifikasi (PPG)</li> <li>2. Minimnya pelatihan yang diikuti oleh guru-guru</li> </ol>	Internal dan Eksternal	C/UC	Penguasaan pembelajaran tidak optimal	Masyarakat (Peserta Didik)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Rendahnya minat dan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan	RSP.22.01,08,38.01.21	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhi kebutuhan sarana prasarana yang layak, memadai dan merata di bidang Pendidikan</li> <li>2. Biaya sekolah yang tinggi, khususnya biaya TK Swasta</li> <li>3. Banyaknya jumlah sarana prasarana layanan pendidikan yang rusak, khususnya dalam akses jalan menuju sekolah</li> <li>4. Kesulitan memperoleh lahan untuk pembangunan sekolah</li> <li>5. Masih adanya pemberlakuan hukuman di sekolah</li> <li>6. Kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA)</li> <li>7. Masih adanya kasus kekerasan pada peserta didik</li> <li>8. Minimnya SDM psikolog/konselor</li> </ol>	Internal dan Eksternal	C/UC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kualitas dan kuantitas peserta didik</li> <li>2. Meningkatnya angka putus sekolah</li> </ol>	Masyarakat (Peserta Didik)
			Rendahnya motivasi dan partisipasi peserta didik dalam meraih prestasi olahraga	RSP.22.01,19.01.22	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya sarana prasarana kepemudaan dan olahraga untuk berkreatifitas</li> <li>2. Kurangnya <i>Event-Event</i> Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>3. Kurangnya partisipasi atlet dan cabang olahraga dalam mengikuti perlombaan (minimal tingkat kota)</li> </ol>	Internal dan Eksternal	C/UC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya peserta didik yang lanjut sekolah melalui jalur prestasi</li> <li>2. Tidak tersalurkannya potensi dan minat peserta didik</li> <li>3. Tidak adanya regenerasi atlet</li> </ol>	Peserta didik
	Sasaran 3: Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Pengeluaran	Kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan barang penting	RSP.22.30.01.23	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya ketersediaan bahan pokok masyarakat dan barang penting</li> <li>2. Resesi global</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internal</li> <li>2. Eksternal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C</li> <li>2. UC</li> </ol>	Daya beli masyarakat atas bahan pokok dan barang penting menurun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat (Konsumen)</li> <li>2. Pelaku Usaha</li> </ol>

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sasaran 4: Meningkatnya Penerapan Budaya Melayu	1 Persentase Penerapan 4 Jenis Budaya Melayu	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya melayu Kota Dumai	RSP.22.03,05, 22,31.01.24	Walikota	1. Kemajemukan/kebergaman masyarakat di Kota Dumai 2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi untuk penerapan tentang eksistensi budaya melayu 3. Kurangnya pelestarian budaya melayu sebagai identitas budaya Kota Dumai	Internal dan Eksternal	C	Hilangnya identitas melayu di Kota Dumai	Masyarakat, Pemerintah Kota Dumai
	Tujuan 3 : Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah								
	Sasaran 1: Meningkatnya Infrastruktur Kota	1 Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	Jalan akses untuk aktivitas masyarakat diantaranya sekolah, perkantoran, pasar, dan fasilitas kesehatan yang beririsan dengan aktivitas industri	RSP.22.03.01. 25	Walikota	1. Keterbatasan anggaran 2. Keterbatasan kewenangan terkait kawasan hutan	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas 2. Terganggunya produktivitas masyarakat dan industri	Masyarakat dan industri
			Kondisi jalan yang cepat rusak	RSP.22.15.01. 26	Walikota	Tingginya volume truk-truk bertonase berat yang melintas di wilayah Kota Dumai	Internal dan Eksternal	C/UC	1. Potensi laka lintas 2. Terganggunya arus lalu lintas Kota Dumai	Masyarakat
			Terbatasnya ketersediaan dan keterjangkauan air minum pada wilayah tertentu	RSP.22.03.01. 27	Walikota	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber air baku 2. Terbatasnya jaringan perpipaan untuk melayani seluruh Kota Dumai 3. Pemanfaatan lahan untuk penyediaan sarpras air minum yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan	Internal	C	Kebutuhan air minum masyarakat dan industri tidak terpenuhi	Masyarakat dan industri

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Pencemaran air, udara, dan tanah oleh limbah domestik	RSP.22.03.01.28	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lahan untuk pembangunan Instalasi Air limbah Komunal sulit di dapat karena merupakan lahan warga</li> <li>Terbatasnya pembangunan sanitasi individu dan komunal yang layak secara teknis</li> </ol>	eksternal	UC	Terganggunya tingkat kesehatan masyarakat	Masyarakat
			Pembangunan infrastruktur jalan terhambat	RSP.22.03.01.29	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kota Dumai belum menetapkan SK Ruas Jalan yang mengatur pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur PSU antara Dinas Perkintan, Dinas PUPR dan kecamatan</li> <li>Tidak meratanya pembangunan jalan</li> <li>Jalan yang dibangun berada di kawasan hutan dan konsesi</li> </ol>	internal	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akses masyarakat tidak lancar</li> <li>Terganggunya perekonomian</li> </ol>	Masyarakat, OPD Penyelenggara Infrastruktur
			Genangan air pada kawasan tertentu	RSP.22.03.01.30	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasang Air Rob</li> <li>Daerah tangkapan air yang sudah berubah fungsi menjadi permukiman/ perkebunan</li> </ol>	eksternal	UC	Terganggunya aktivitas masyarakat	Masyarakat
			Besarnya tagihan PJU yang dibebankan karena adanya pemasangan PJU ilegal	RSP.22.15.01.31	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan PJU secara mandiri oleh masyarakat</li> <li>Kurangnya cakupan layanan pemasangan PJU</li> </ol>	Internal dan Eksternal	C/UC	Tingginya beban APBD	Pemko Dumai

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Keterbatasan kewenangan Kota Dumai dalam penanganan kawasan kumuh	RSP.22.04.01.32	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kab/Kota hanya dapat menangani kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, selain itu merupakan kewenangan Provinsi dan Pusat</li> <li>Persyaratan penanganan kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh Provinsi dan Pusat berpotensi pada karakteristik kumuh di beberapa kawasan kumuh Kota Dumai tidak sesuai/tidak memenuhi dengan permintaan persyaratan penanganan kawasan kumuh dari Provinsi dan Pusat</li> </ol>	Internal Eksternal	C/UC	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat masih berada di kawasan kumuh</li> <li>Kawasan kumuh yang ditangani sangat terbatas</li> </ol>	Masyarakat
			Peningkatan level kawasan kumuh yang ada di Kota Dumai	RSP.22.04.01.33	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya penetapan prioritas kawasan kumuh yang akan ditangani</li> <li>Penanganan kumuh di Kota Dumai masih bergantung pada dana Pusat, sehingga apabila terjadi moratorium atau perubahan kebijakan dari Pusat maka kawasan kumuh di Kota Dumai sulit untuk diintervensi terutama di kawasan kumuh dengan luas di atas 10 Ha</li> </ol>	Internal Eksternal	C/UC	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat masih berada di kawasan kumuh</li> <li>Terhambatnya penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi dan Pusat seluas 206 Ha</li> </ol>	Masyarakat
			Overlap/tumpang tindih dalam pembangunan PSU antara Dinas Perkintan, Dinas PUPR dan kecamatan	RSP.22.04.01.34	Walikota	Pemerintah Kota Dumai belum menetapkan SK Ruas Jalan yang mengatur pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur PSU antara Dinas Perkintan, Dinas PUPR dan kecamatan	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>Percepatan peningkatan infrastruktur terhambat karena overlap terhadap lokasi yang seharusnya bisa diintervensi pada tahun berkenaan</li> <li>Masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari fasilitas</li> </ol>	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
									PSU lain yang seharusnya dapat diintervensi pada tahun berkenaan	
			Pembangunan PSU pada aset pihak ketiga yang belum diserahkan	RSP.22.04.01.35	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tuntasnya pelaksanaan inventarisasi terkait developer yang belum melakukan serah terima PSU</li> <li>2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pihak developer terkait kewajiban untuk menyerahkan aset PSU kepada Pemko Dumai</li> </ol>	Internal Eksternal	C/UC	Penurunan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman menjadi kawasan kumuh	Pemko Dumai
	Sasaran 2: Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	1 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Aturan	Lambatnya penyelesaian sengketa tanah di Kota Dumai terkait kawasan hutan dan kawasan BMN	RSP.22.04.01.36	Walikota	Terbatasnya kewenangan Kota dalam mengatasi konflik pertanahan akibat regulasi yang membatasi kewenangan Pemko Dumai	Internal Eksternal	C/UC	Belum adanya kepastian kepemilikan tanah di masyarakat dan Pemko	Pemko Dumai, Masyarakat
			Penetapan RDTR di lahan masyarakat	RSP.22.04.01.37	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RTR belum memenuhi harapan masyarakat</li> <li>2. Terjadi miss pada saat penyusunan dokumen RTR oleh Dinas PUPR</li> </ol>	Internal	C	Terhambatnya pengurusan alas hak kepemilikan tanah Pemko Dumai dan masyarakat	Pemko Dumai, Masyarakat
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rendahnya kualitas air	RSP.22.11.01.38	Walikota	Kondisi alam seperti sebagian berada di lahan gambut dan tingginya nilai kekeruhan dan warna serta unsur-unsur logam	Eksternal	UC	Kurangnya ketersediaan air minum yang dapat dikonsumsi masyarakat	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		2 Cakupan Pelayanan Persampahan	Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah	RSP.22.03.11.01.39	Walikota	Aktivitas industri dan masyarakat yang tidak tertib dalam pengelolaan limbah dan sampah	Eksternal	UC	Terganggunya kesehatan lingkungan dan makhluk hidup	Makhluk hidup
		3 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Masih tingginya timbunan sampah	RSP.22.11.03.01.40	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang dapat dijangkau masyarakat</li> <li>Perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan</li> <li>Belum terlaksananya pelaksanaan regulasi yang mengatur sanksi terkait pengolahan sampah di masyarakat</li> </ol>	Internal dan Eksternal	C/UC	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat</li> <li>Terganggunya estetika lingkungan di Kota Dumai</li> </ol>	Masyarakat
			Pembangunan kota tidak tertata dengan baik	RSP.22.03.01.41	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan tidak memiliki izin sesuai dengan aturan</li> <li>Belum adanya regulasi terkait sanksi</li> </ol>	eksternal	C/UC	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terganggunya estetika kota</li> <li>Munculnya kawasan kumuh</li> </ol>	Masyarakat
		4 Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani	Ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat	RSP.22.06.01.42	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak sesuainya kebutuhan masyarakat dengan standar bantuan yang dimiliki Pemko</li> <li>Kurang koordinasi antar OPD dan instansi terkait lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Internal</li> <li>Internal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>C</li> <li>C</li> </ol>	Masyarakat tidak menerima bantuan sesuai yang dibutuhkan	Masyarakat
			Terjadinya kebakaran yang tidak dapat diprediksi (KLB/force majeure)	RSP.22.39.01.43	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perilaku masyarakat untuk membakar lahan secara sengaja</li> <li>Belum terimplementasi ke masyarakat secara luas atas sistem pendeteksi kebakaran melalui satelit (aplikasi sipeka)</li> </ol>	Internal dan Eksternal	C/UC	Terlambatnya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan	Masyarakat, pelaku usaha
			Pembakaran Lahan secara konvensional melalui membakar	RSP.22.39.01.44	Walikota	Perilaku masyarakat untuk membakar lahan karena biaya murah	Eksternal	UC	Titik api menjadi bertambah	Masyarakat, pelaku usaha

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Keterlambatan penanganan bencana kebakaran	RSP.22.39.01.45	Walikota	1. Keterlambatan koordinasi karena keterbatasan wewenang BPBD 2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana 3. Lokasi yang sulit diakses 4. Musim kemarau dan angin kencang 5. Terbatasnya sumber air di lokasi rentan kebakaran 6. Belum ditetapkan titik evakuasi	Eksternal	UC	1. Terganggunya kesehatan dan perekonomian masyarakat 2. Terhambatnya aktivitas masyarakat dan perusahaan 3. Wilayah kebakaran hutan dan lahan lebih luas	Masyarakat, pelaku usaha
			Timbulnya bencana baru (ledakan kilang)	RSP.22.39.01.46		1. Banyaknya industri pengolahan migas 2. Terjadinya kesalahan pengoperasian industri pengolahan	Eksternal	UC	1. Terjadinya korban jiwa dilokasi 2. Kerugian material	Masyarakat, Pelaku Usaha
	Tujuan 4: Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi								
	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	Keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dari batas waktu yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri	RSP.22.37.01.47	Walikota Dumai	Belum/tidak disepakatinya penyusunan Ranperda APBD antara Walikota bersama DPRD	Eksternal/ Internal	UC	1. Terlambatnya tahapan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Berjalan di lingkungan Pemko Dumai 2. Penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat 3. Penundaan pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan anggota DPRD	Masyarakat, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai
			Tidak tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar	RSP.22.37.01.48	Walikota Dumai	1. Kurangnya Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Belum efektifnya SPI Pengelolaan Keuangan Daerah	Eksternal/ Internal	C	Tidak tercapainya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pemerintah Kota Dumai

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Akuntansi Pemerintahan							
		2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Hasil evaluasi AKIP OPD (internal) belum optimal	RSP.22.35.01.49	Wali Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Perangkat Daerah tidak memahami dan menguasai kinerja Daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>2. Kualitas perencanaan pemda belum memadai</li> <li>3. Hanya sebatas pemenuhan dokumen saja, belum termasuk untuk memenuhi kualitas substansi dokumen</li> <li>4. PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum disosialisasikan kepada APIP sehingga persepsi evaluator berbeda-beda</li> </ol>	Internal	C	Nilai AKIP Pemda tidak optimal	Wali Kota

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Penilaian risiko bersifat formalitas	RSP.22.35.01.50		1. SDM yang terlibat dalam penyusunan peta risiko bukan yang memahami konsep dan substansi risiko 2. Pemilik risiko belum merasa perlu dalam menyusun risiko	Internal	C	1. Hasil penilaian risiko belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan serta pengambilan keputusan 2. Penilaian risiko yang strategis belum diupdate 3. Pengelolaan risiko menjadi parsial atau tidak terintegrasi 4. <i>Awareness</i> atas risiko-risiko yang disusun tidak didukung kebijakan pengelolaan risiko oleh pimpinan 5. Potensi kerugian/pemborosan keuangan daerah dalam penganggaran karena program yang direncanakan tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan Pemda 6. Rencana tindak pengendalian tidak ditindaklanjuti' 7. Risiko atas pencapaian tujuan organisasi/pemko dapat terjadi dan berulang dengan penyebab yang sama 8. Tidak ada pemantauan risiko dan RTP-nya	Pemerintah Kota Dumai



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Internal/ Eksternal)	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Sistem pelayanan masyarakat yang tidak memenuhi harapan masyarakat	RSP.22.12.01.54	Pemerintah Kota Dumai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang kompeten pelaksana</li> <li>2. Rendahnya perilaku melayani dari petugas</li> <li>3. Sarana prasarana yang tidak memenuhi standar</li> <li>4. Sistem pelayanan pengaduan masyarakat yang tidak optimal</li> <li>5. Keluhan masyarakat yang telah ditindaklanjuti tidak dipantau secara berkala</li> </ol>	Internal dan Eksternal	C	Nilai IKM tidak mencapai target	Pemerintah Kota Dumai
			Sistem pelayanan belum merata ke seluruh masyarakat sasaran	RSP.22.12.01.55	Pemko Dumai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis Dumai</li> <li>2. Kurangnya ketersediaan Sarana dan prasarana yang memenuhi standar dilokasi yang jauh</li> </ol>	Eksternal	UC C	Tingkat kepuasan masyarakat tidak merata	Pemerintah Kota Dumai, dan Masyarakat
c		2 Indeks Layanan SPBE	Belum optimal pemenuhan kapasitas nilai maturitas indikator SPBE yang berkelanjutan	RSP.22.16.01.56	Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam penerapan SPBE</li> <li>2. Belum terlaksananya tata kelola SPBE yg terpadu</li> <li>3. Pedoman atau kebijakan SPBE tidak dilaksanakan</li> <li>4. Terbatasnya kompetensi SDM SPBE dan ego sektoral perangkat daerah</li> <li>5. Belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu.</li> </ol>	Eksternal	UC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan SPBE tidak saling sehingga menurunnya kualitas layanan SPBE Kota Dumai;</li> <li>2. Tidak tercapainya target indeks SPBE</li> </ol>	Masyarakat & ASN

LAMPIRAN 2:

Hasil Analisis Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : 2023 - 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Tujuan 1 : Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi													
	Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Kurangnya kemandirian usaha UMKM dan IKM sehingga kualitas produknya belum mampu berdaya saing dengan industri lainnya	RSP.22.17.0 1.01	1. Kurangnya pendapatan pelaku usaha 2. Kurangnya minat masyarakat (pembeli) terhadap produk IKM dan UMKM 3. Rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang tidak dimungkinkan melebihi pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun	Pelaku industri dan Pemerintah Kota Dumai	5	5	25	1. Melakukan promosi dengan keikutsertaan dalam pameran ditingkat nasional 2. Peta Potensi Investasi yang memuat dukungan secara umum untuk investasi 3. Melakukan promosi investasi secara online 4. Perda No. 15 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039;	1. Produk yang ditampilkan dalam pameran tidak melalui seleksi yang memberikan nilai tambah produk 2. Peta Potensi Investasi belum memuat kawasan industri secara detail 3. Promosi Investasi secara online belum tepat menyasar	4	5	24	V

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
					<p>pada tahun 2010-2020</p> <p>4. Tidak ada penambahan nilai produks/kontribusi di sektor IKM</p> <p>5. Produk UMKM tidak mampu mendukung kebutuhan industri besar dalam pemenuhan standar perusahaan</p> <p>6. Tidak ada ekspansi ekonomi</p> <p>7. Peningkatan investasi di kawasan industri yang rendah</p>					<p>5. Perwako No. 24 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai Tahun 2021-2041;</p> <p>6. Perwako No. 33 Tahun 2021 tentang RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Medang Kampai Tahun 2021-2041.</p>	<p>investor yang sesuai</p> <p>4. Cakupan RDTR belum atas seluruh KPI Kota Dumai</p> <p>5. Fasilitas air bersih belum mencukup untuk seluruh kawasan industry</p> <p>6. Terdapat ketidaksempurnaan Dokumen RDTR sehingga berdampak terganggunya proses perizinan di Kota Dumai</p>				
		2 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB													
		3 PDRB Perkapita ADHK	Kurangnya transaksi ekonomi pada koperasi	RSP.22.17.0 1.02	Rendahnya kontribusi koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Masyarakat	4	4	19	Sosialisasi terhadap peningkatan SDM	Motivasi untuk berdaya saing Koperasi tidak ada.	4	4	19	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		4 PDRB Perkapita ADHB	Program pemerintah yang dijalankan terkait pengembangan pelaku usaha mengalami tumpang tindih dan tidak terarah	RSP.22.17.01.03	Pelaku usaha tidak dapat terfasilitasi dengan tepat dan sesuai kebutuhan	Pelaku usaha	4	4	19	Pembinaan terhadap pelaku usaha	Pembinaan terhadap pelaku usaha belum dilakukan secara rutin dan kontinu	4	3	16	
			Rendahnya realisasi ekspor perdagangan	RSP.22.30.01.04	1. Menurunnya PDRB Kota Dumai	Pelaku Usaha	3	3	14	1. Pembentukan tim fasilitasi pelaku usaha UMKM dalam rangka pengembangan ekspor 2. Melakukan promosi dan misi dagang produk unggulan daerah	Pelaku usaha yang di fasilitasi dan di promosikan hanya dibatasi pada Kategori Produk Unggulan Daerah sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan pembinaan	2	3	11	
			Panjangnya jalur distribusi	RSP.22.30.01.05	inflasi	1. Masyarakat (Konsumen) 2. Pelaku Usaha (Distributor)	4	4	19	Melakukan pengawasan terhadap distributor	Masih Kurangnya SDM untuk Pengawasan	4	4	19	
			Penimbunan barang tidak terkendali	RSP.22.30.01.06	inflasi	Masyarakat (Konsumen)	5	4	23	Pengawasan terhadap barang beredar	Masih kurangnya koordinasi distributor dengan pihak terkait	5	4	23	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Penumpukan stock inventori tertahan dalam waktu yang menjadikan inventori menurun kualitasnya	RSP.22.30.01.07	Penambahan biaya produksi lain untuk dapat mempertahankan kualitas Hasil produksi	Pelaku Usaha	4	5	24	Sudah ditetapkan kawasan pergudangan pada Perda No. 15 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039;	Belum terbitnya perwako RDTR Kecamatan Bukit Kapur tentang pergudangan	4	4	19	
			Menurunnya PAD	RSP.22.37.01.08	Anggaran Belanja Pemerintah Daerah menurun	Walikota dan Masyarakat	4	5	24	1Penggunaan aplikasi online untuk mempermudah pembayaran pajak daerah	Gangguan jaringan pada aplikasi sehingga pembayaran tetap harus dilakukan secara manual	4	5	24	
	Sasaran 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Gini													
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Terbatasnya peluang kesempatan kerja dan berwirausaha di Kota Dumai	RSP.22.07.01.09	1. Menurunnya tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masyarakat	4	4	19	1. Sosialisasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Perwako No. 37 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal. 2. Pelatihan kepada Angkatan Kerja	1. Pelatihan Angkatan Kerja belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja. 2. Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Perwako No. 37 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal. tidak	3	4	17	V

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
											sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi				
		3 Tingkat Kemiskinan	Ketimpangan pembangunan antar wilayah	RSP.22.07.01.10	Masyarakat minim fasilitas dalam menggerakkan ekonominya	Masyarakat	4	3	16	Pemerataan Pembangunan Jalan sampai tingkat kelurahan yang sudah tertuang pada Perda No. 6 Tahun tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026	Belum terpenuhi seluruh target pemerataan	4	2	12	
			Pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran termasuk Program pemerintah tidak menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat miskin sesuai dengan kondisi kemiskinannya	RSP.22.06.01.11	1. Jangkauan masyarakat prasejahtera yang dapat dicukupi kehidupannya secara seimbang menjadi terbatas 2. Bantuan yang diberikan tidak maksimal memperbaiki kondisi kemiskinan masyarakat tersebut	Masyarakat	4	4	19	1. Dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Usulan data terpadu kesejahteraan sosial (dtkss) dan Usulan Bantuan Sosial (Bansos) 2. Melakukan verifikasi dan validasi data menggunakan indikator lokal kemiskinan untuk pemuktahiran data base kemiskinan, sehingga didapat informasi yang lengkap kemiskinan masyarakat terkait kondisi	1. Adanya konflik kepentingan dari Stakeholder tertentu terkait usulan DTKS dan usulan bansos 2. Verifikasi dan validasi data belum optimal karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 3. Program pengentasan kemiskinan	3	4	17	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
										3. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Dumai untuk sinkronisasi program pengentasan kemiskinan di setiap OPD	belum optimal di masing-masing OPD				
			Potensi Kelompok rentan miskin jatuh menjadi miskin	RSP.22.06.01.12	Menambah angka kemiskinan	Masyarakat; Walikota	4	4	19	1. Pengurangan Beban dibidang dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan rumah layak huni, Sanitasi layak dan air minum 2. Operasi Pasar, Pasar Tani	Belum mencakup seluruh sasaran	4	3	16	
	Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1 Skor Pola Pangan Harapan (Kualitas Konsumsi Pangan)	Persepsi masyarakat bahwa makan ikan tidak menarik	RSP.22.25.01.13	Tidak tercukupinya kebutuhan gizi hewani (ikan) pada masyarakat	Masyarakat	4	5	24	1. Sosialisasi Gemarikan 2. Pembinaan pengembangan pengolahan komoditi ikan	sulitnya melakukan perubahan pola pikir masyarakat untuk mengganti panganan hewani dari daging-dagingan (ayam atau daging) ke ikan	3	4	17	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target		Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
				Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				Rendahnya ketersediaan pangan di Kota Dumai	RSP.22.25.01.14	1. Kesulitan masyarakat dalam memperoleh ikan 2. Tidak terpenuhinya keberagaman kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat	Masyarakat	5	5	25	1. ekstensifikasi perikanan 2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Budidaya tambak dan laut di Kota Dumai sesuai dengan RZWP3K kepada DKP Provinsi Riau 3. Pembinaan kepada pembudidaya secara intensif dan sharing ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pembudidayaan ikan 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan 5. Sosialisasi Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1. membutuhkan biaya yang besar 2. belum ada pemetaan daerah potensi perikanan 3. Sosialisasi yang diberikan kurang diindahkan oleh masyarakat karena keterbatasan ekonomi	4	4	19	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		2 Ketersediaan Pangan Utama	1. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan 2. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar	RSP.22.25.01.15	1. Produk yang dimiliki tidak memiliki daya saing/nilai jual yang tinggi 2. Kota Dumai tidak memiliki diversifikasi produk olahan perikanan	Walikota, Dinas Perikanan dan pelaku usaha perikanan	5	5	25	1. pembinaan, pendampingan dan pelatihan kepada pembudidaya ikan 2. koordinasi dengan DKP Provinsi Riau	1. pembinaan, pendampingan dan pelatihan yang diberikan belum dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan SDM 2. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kotora	4	4	19	
			Belum meratanya ketersediaan pangan	RSP.22.27.01.16	Tidak seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangannya	Walikota, Masyarakat	5	5	25	1.Penyuluhan dan Pendampingan kepada kelompok tani penghasil pangan utama 2. Peningkatan produktivitas tanaman baik pangan, hortikultura, perkebunan,	Penyuluhan dan pendampingan belum dijalankan maksimal oleh kelompok tani	4	5	24	V



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Sasaran 1: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Kesehatan	Menurunnya kualitas hidup masyarakat	RSP.22.02.01.19	'Meningkatnya mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan)	Masyarakat	3	5	22	Upaya preventif, promotif (penyuluhan), kuratif, seperti: 1. Pelayanan gizi masyarakat 2. Pemberian makanan tambahan 3. Ambulance 24 jam di tingkat Kecamatan 4. Membantu Premi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak 5. Memberikan kemudahan layanan di Puskesmas dan RSUD Kota Dumai	Masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya kesehatan	3	3	14	V
	Sasaran 2: Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Pendidikan													
			Kualitas SDM/GTK (Guru Tenaga Kependidikan) masih rendah	RSP.22.01,38.01.20	Penguasaan pembelajaran tidak optimal	Masyarakat (Peserta Didik)	3	4	17	1. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru 2. Program Calon Guru Penggerak	Rendahnya minat guru untuk meningkatkan kompetensinya	3	4	17	
			Rendahnya minat dan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan	RSP.22.01,08,38.01.21	1. Menurunnya kualitas dan kuantitas peserta didik 2. Meningkatnya angka putus sekolah	Masyarakat (Peserta Didik)	4	4	19	1. Menginput data sarpras pada aplikasi DAPODIK sesuai kondisi riil dalam rangka pemetaan pembangunan layanan pendidikan	1. Penyampaian data sarpras yang diinput pada aplikasi DAPODIK tidak sesuai dengan kondisi	4	4	19	V

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
										2. Penerapan sistem zonasi 3. Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak 5. Penjangkauan kasus bersama psikolog/konselor 6. Koordinasi dengan sektor internal dan eksternal	riil 2. Tidak tertampungnya peserta didik khususnya di wilayah perkotaan 3. Masih rendahnya pemahaman peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap pentingnya pendidikan				
			Rendahnya motivasi dan partisipasi peserta didik dalam meraih prestasi olahraga	RSP.22.01,19.01.22	1. Rendahnya peserta didik yang lanjut sekolah melalui jalur prestasi 2. Tidak tersalurkannya potensi dan minat peserta didik 3. Tidak adanya regenerasi atlet	Peserta didik	4	4	19	1. Pemberian penghargaan kepada peserta didik berprestasi melalui bantuan uang pembinaan 2. Rekrutmen pelatih-pelatih bersertifikat 3. Pengadaan sarana prasarana pendukung 4. Pelaksanaan ekstrakurikuler	Masih kurangnya minat peserta didik melalui penjangkauan di sekolah	3	3	14	
	Sasaran 3: Meningkatkan Standar Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Pengeluaran	Kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan barang penting	RSP.22.30.01.23	Daya beli masyarakat atas bahan pokok dan barang penting menurun	1. Masyarakat (Konsumen) 2. Pelaku Usaha	5	4	23	1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah 2. Pengawasan terhadap distributor	Stok barang tetap tersedia	4	4	19	V
	Sasaran 4: Meningkatkan Penerapan	1 Persentase Penerapan 4 Jenis	Rendahnya kesadaran dan partisipasi	RSP.22.03,05,22,31.01.24	Hilangnya identitas melayu di Kota Dumai	Masyarakat, Pemerintah Kota Dumai	4	4	19	1. Perwako tentang Penerapan Budaya Melayu di Lingkungan Kota	Ketidakpedulian masyarakat dalam berbudaya	4	3	16	V

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Budaya Melayu	Budaya Melayu	masyarakat dalam melestarikan budaya melayu Kota Dumai							Dumai no. 79 tahun 2021 di perundangkan tahun 2022 2. Melaksanakan kegiatan yang dapat melestarikan kebudayaan melayu melalui pertunjukan seni	melayu sebagai identitas budaya di Kota Dumai				
	Tujuan 3 : Mewujudkan Infrastruktural dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktural Daerah													
	Sasaran 1: Meningkatkan Infrastruktural Kota	1 Tingkat Pelayanan Infrastruktural Daerah	Jalan akses untuk aktivitas masyarakat diantaranya sekolah, perkantoran, pasar, dan fasilitas kesehatan yang beririsan dengan aktivitas industri	RSP.22.03.01.25	1. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas 2. Terganggunya produktivitas masyarakat dan industri	Masyarakat dan industri	5	5	25	1. Pemeliharaan jalan provinsi 2. Pengawasan oleh Dishub 3. Pembatasan waktu bagi kendaraan industri untuk beroperasi 4. Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTRW 2019-2039 5. Melaksanakan penyusunan AMDAL 6. Penyusunan perda terkait tonase kendaraan industri (crosscutting dengan Dishub)	Belum tertibnya kendaraan industri yang melintasi jalan akses sesuai jadwal pembatasan waktu dan aturan tonase kendaraan (ODOL)	2	5	21	V
			Kondisi jalan yang cepat rusak	RSP.22.15.01.26	1. Potensi laka lantas 2. Terganggunya	Masyarakat	4	4	19	1. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan,	Kurangnya kesadaran pengguna	3	4	17	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
					arus lalu lintas Kota Dumai					Penertiban dan Penegakan Hukum dan pemantauan melalui CCTV 2. Adanya Jam Larangan melintas menuju kawasan industri 3. Penempatan personil selama jam larangan	jalan dalam tertib berlalu lintas				
			Terbatasnya ketersediaan dan keterjangkauan air minum pada wilayah tertentu	RSP.22.03.01.27	<i>Kebutuhan air minum masyarakat dan industri tidak terpenuhi</i>	<i>Masyarakat dan industri</i>	4	4	19	1. SPAM KPBU, NUWSP, DUROLIS 2. Penyediaan air yang bersumber dari sumur bor 3. Koordinasi dengan BPKH terkait kawasan	Keterbatasan air baku	3	3	14	
			Pencemaran air, udara, dan tanah oleh limbah domestik	RSP.22.03.01.28	<i>Terganggunya tingkat kesehatan masyarakat</i>	<i>Masyarakat</i>	4	4	19	1. Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2. Penilaian kesehatan masyarakat oleh Dinkes	Kesadaran masyarakat untuk membentuk pola kebiasaan hidup bersih dan sehat	3	4	17	
			Pembangunan infrastruktur jalan terhambat	RSP.22.03.01.29	<i>1. Akses masyarakat tidak lancar 2. Terganggunya perekonomian</i>	Masyarakat, OPD Penyelenggara Infrastruktur	4	5	24	<i>Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan</i>	<i>Masih adanya kondisi jalan yang belum mantap</i>	4	4	19	
			Genangan air pada kawasan tertentu	RSP.22.03.01.30	Terganggunya aktivitas masyarakat	Masyarakat	4	4	19	Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir	Masih adanya genangan air pada kawasan tertentu	3	4	17	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Besarnya tagihan PJU yang dibebankan karena adanya pemasangan PJU ilegal	RSP.22.15.01.31	Tingginya beban APBD	Pemko Dumai	4	4	19	1. Perjanjian Kerjasama tentang Pemutusan langsung PJU ilegal oleh PLN 2. Pemasangan meterisasi PJU	Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang aturan pemasangan PJU	3	4	17	
			Keterbatasan kewenangan Kota Dumai dalam penanganan kawasan kumuh	RSP.22.04.01.32	1. Masyarakat masih berada di kawasan kumuh 2. Kawasan kumuh yang ditangani sangat terbatas	Masyarakat	5	5	25	Koordinasi Walikota dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan pihak terkait lainnya mengenai program penanganan kawasan kumuh yang sesuai dengan karakteristik Kota Dumai	Usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi belum tentu dapat diakomodir	4	4	19	
			Peningkatan level kawasan kumuh yang ada di Kota Dumai	RSP.22.04.01.33	1. Masyarakat masih berada di kawasan kumuh 2. Terhambatnya penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi dan Pusat seluas 206 Ha	Masyarakat	4	4	19	Menetapkan SK Kawasan Kumuh Kota Dumai	Masih terdapat kawasan kumuh yang belum diintervensi	3	3	14	
			Overlap/tumpang tindih dalam pembangunan PSU antara Dinas Perkimtan, Dinas PUPR dan kecamatan	RSP.22.04.01.34	1. Percepatan peningkatan infrastruktur terhambat karena overlap terhadap lokasi yang seharusnya bisa diintervensi pada tahun berkenaan 2. Masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari	Masyarakat	4	3	16	Adanya kebijakan dari kepala daerah tentang pembagian kewenangan pembangunan jalan	Kebijakan yang ada belum terinci dan sistematis	3	3	14	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
					fasilitas PSU lain yang seharusnya dapat diintervensi pada tahun berkenaan										
			Pembangunan PSU pada aset pihak ketiga yang belum diserahkan	RSP.22.04.01.35	Penurunan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman menjadi kawasan kumuh	Pemko Dumai	3	5	22	Melakukan kontrol terhadap usulan pembangunan infrastruktur PSU yang berada pada aset pihak ketiga yang belum diserahkan sesuai dengan PERWAKO Nomor 55 Tahun 2022 tentang tata cara penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah kota Dumai	- Aset PSU yang terbengkalai oleh pihak pengembang belum dilakukan proses serah terima mengikuti ketentuan berdasarkan perwako nomor 55 tahun 2022 - Masyarakat tetap mengusulkan pembangunan infrastruktur PSU yang berada pada aset pihak ketiga yang belum diserahkan	2	5	21	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Sasaran 2: Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	1 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Aturan	Lambatnya penyelesaian sengketa tanah di Kota Dumai terkait kawasan hutan dan kawasan BMN	RSP.22.04.01.36	Belum adanya kepastian kepemilikan tanah di masyarakat dan Pemko	Pemko Dumai, Masyarakat	4	4	19	Melakukan upaya sosialisasi/mediasi terhadap pihak yang bersengketa/berkonflik sesuai kewenangan Pemko Dumai	Hasil sosialisasi/mediasi belum dapat menyelesaikan permasalahan secara maksimal	3	3	14	V
			Penetapan RDTR di lahan masyarakat	RSP.22.04.01.37	Terhambatnya pengurusan alas hak kepemilikan tanah Pemko Dumai dan masyarakat	Pemko Dumai, Masyarakat	4	4	19	Mengadakan koordinasi terkait RTR Kota Dumai	Masih terdapat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTR Kota Dumai	3	3	14	
	Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rendahnya kualitas air	RSP.22.11.01.38	Kurangnya ketersediaan air minum yang dapat dikonsumsi masyarakat	Masyarakat	4	4	19	Membuat Program Air Minum (PUPR)	Belum meratanya pembangunan program air minum untuk kebutuhan masyarakat	3	4	17	
		2 Cakupan Pelayanan Persampahan	Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah	RSP.22.03.11.01.39	Terganggunya kesehatan lingkungan dan makhluk hidup	Makhluk hidup	3	4	17	Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam mengelola limbah dan sampah	3	4	17	
		3 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Masih tingginya timbunan sampah	RSP.22.11.03.01.40	1. Pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat 2. Terganggunya estetika lingkungan di Kota Dumai	Masyarakat	4	4	19	Pemberian sanksi	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah	4	3	16	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Pembangunan kota tidak tertata dengan baik	RSP.22.03.01.41	1. Terganggunya estetika kota 2. Munculnya kawasan kumuh	Masyarakat	3	4	17	1. Perda RTRW, Perda PBG, Perwako RTDR 2. Pelaksanaan Sosialisasi Penataan Ruang 3. Pemberian peringatan	Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha tentang tata ruang	3	4	17	
		4 Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani	Ketidaksediaan bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat	RSP.22.06.01.42	Masyarakat tidak menerima bantuan sesuai yang dibutuhkan	Masyarakat	5	4	23	Memberikan bantuan berdasarkan laporan dari pihak kelurahan yang terkena bencana sesuai dengan standar bansos dari dinas sosial	Bantuan yang diberikan tidak optimal	4	4	19	
			Terjadinya kebakaran yang tidak dapat diprediksi (KLB/force majeure)	RSP.22.39.01.43	1. Terlambatnya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan	Masyarakat, pelaku usaha	5	5	25	1. koordinasi lintas sektoral daerah dan pusat 2. kendaraan operasional mesin pompa perahu karet 3. sosialisasi karhutla kepada pelaku industri dan masyarakat	Tidak berjalannya sistem manajemen resiko yang terintegrasi dengan proses perencanaan strategis	4	4	19	V
			Pembakaran Lahan secara konvensional melalui membakar	RSP.22.39.01.44	Titik api menjadi bertambah	Masyarakat, pelaku usaha		5	25	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha	lemahnya pengawasan	4	4	19	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Keterlambatan penanganan bencana kebakaran	RSP.22.39.01.45	1. Terganggunya kesehatan dan perekonomian masyarakat 2. Terhambatnya aktivitas masyarakat dan perusahaan 3. Wilayah kebakaran hutan dan lahan lebih luas	Masyarakat, pelaku usaha	5	5	25	1. peraturan walikota dumai Nomor 71 tahun 2016 tentang SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang susunan Daerah Kota Dumai	1. perubahan peraturan perundangan 2. kegagalan teknologi	4	4	19	
			Timbulnya bencana baru (ledakan kilang)	RSP.22.39.01.46	1. Terjadinya korban jiwa dilokasi 2. Kerugian material	Masyarakat, Pelaku Usaha	5	5	25	Adanya alokasi anggaran pada Belanja tidak terduga (BTT) untuk Memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak bencana	Bantuan yang diberikan belum maksimal baik pihak Pemda dan perusahaan	4	4	19	
	Tujuan 4: Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi													
	Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	Keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dari batas waktu yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri	RSP.22.37.01.47	1. Terlambatnya tahapan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Berjalan di lingkungan Pemko Dumai 2. Penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat 3. Penundaan pembayaran gaji	Masyarakat, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	4	5	24	Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Sinergitas antara TAPD dan Banggar yang kurang berjalan dengan baik	3	5	22	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko (Nilai Inherent Risk)			Existing Control/Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
					dan tunjangan kepala daerah dan anggota DPRD										
			Tidak tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	RSP.22.37.01.48	Tidak tercapainya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pemerintah Kota Dumai	4	5	24	Sosialisasi / Bimbingan Teknis/FGD/Webinar tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum optimalnya pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	5	22	
		2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Hasil evaluasi AKIP OPD (internal) belum optimal	RSP.22.35.01.49	Nilai AKIP Pemda tidak optimal	Wali Kota	3	4	19	Melaksanakan rapat internal untuk menyamakan persepsi APIP dalam mengevaluasi, pembahasan kertas kerja OPD, serta finalisasi hasil evaluasi implementasi AKIP OPD	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3	4	17	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Penilaian risiko bersifat formalitas	RSP.22.35.01.50	1. Hasil penilaian risiko belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan serta pengambilan keputusan 2. Penilaian risiko yang strategis belum diupdate 3. Pengelolaan risiko menjadi parsial atau tidak terintegrasi 4. <i>Awareness</i> atas risiko-risiko yang disusun tidak didukung kebijakan pengelolaan risiko oleh pimpinan 5. Potensi kerugian/pemborosan keuangan daerah dalam penganggaran karena program yang direncanakan tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan Pemda 6. Rencana tindak pengendalian	Pemerintah Kota Dumai	5	5	25	1. Sudah disusun peta risiko strategis OPD dan operasional OPD 2. Sudah disusun peta risiko pemko Dumai 2023 - 2026 3. Sudah disusun perwako tentang pedoman risiko 4. Sudah dilakukan sosialisasi peta risiko pada perangkat daerah	Stake holder yang terlibat belum memahami komitmen peta risiko yang disusun	4	4	19	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
					tidak ditindaklanjuti' 7. Risiko atas pencapaian tujuan organisasi/pemko dapat terjadi dan berulang dengan penyebab yang sama 8. Tidak ada pemantauan risiko dan RTP-nya										
			Rendahnya kualitas dokumen perencanaan daerah	RSP.22.36.01.51	Kurangnya nilai unsur perencanaan pada penilaian SAKIP	Pemerintah Kota Dumai	4	4	19	Peningkatan kapasitas melalui diklat non gelar pada pusbindiktren Bappenas dan lembaga akademis lainnya.	Masih ada pegawai belum memahami perencanaan pembangunan daerah secara utuh	3	4	17	
					Tidak konsistennya dokumen perencanaan tahunan yang mengakomodir kebijakan pusat yang baru sebagai mandat yang harus dilaksanakan dengan penjabaran dokumen RPJMD (diedit aa)	Pemerintah Kota Dumai	3	4	17	Penyesuaian dokumen rencana tahunan daerah	Masih ada kebijakan Pusat yang muncul setelah penyesuaian dokumen rencana tahunan	3	3	14	
			Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.22.36.01.52	Keterlambatan proses tahapan APBD	Pemerintah Kota Dumai	3	4	17	Koodinasi dan konsultasi ke Pemerintah pusat	Pemenuhan hasil fasilitasi sering terkendala ketersediaan data	3	3	14	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.22.36.01.53	Rendahnya pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD	Walikota	4	3	17	Perwako Perubahan Renstra	Cascading beluym selaras dengan RPJMD	3	3	14	
		3 Indeks Manajemen Risiko													
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Sistem pelayanan masyarakat yang tidak memenuhi harapan masyarakat	RSP.22.12.01.54	Nilai IKM tidak mencapai target	Pemerintah Kota Dumai	4	5	24	Pembinaan komprehensif kepada petugas	Petugas dimutasi	5	4	23	
			Sistem pelayanan belum merata ke seluruh masyarakat sasaran	RSP.22.12.01.55	Tingkat kepuasan masyarakat tidak merata	Pemerintah Kota Dumai, dan Masyarakat	4	5	24	Mengoptimalkan pelayanan di masing kecamatan	jangkauan pelayanan yang masih jauh	4	5	24	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Dampak		Analisis Risiko ( Nilai Inherent Risk)			Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
c		2 Indeks Layanan SPBE	Belum optimal pemenuhan kapasitas nilai maturitas indikator SPBE yang berkelanjutan	RSP.22.16.01.56	1. Penerapan SPBE tidak saling sehingga menurunnya kualitas layanan SPBE Kota Dumai; 2. Tidak tercapainya target indeks SPBE	Masyarakat & ASN	4	4	19	1. SK Walikota no. 049/498/2022 ttg Pembentukan Tim Internal SPBE Kota Dumai; 2. SK Walikota no. 049/497/2022 ttg Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai; 3. Perwako no 67 tahun 2022 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik; dan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2022-2026	1. Belum adanya komitmen Perangkat Daerah untuk Melaksanakan penerapan SPBE secara menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan 2. Belum adanya pengembangan inovasi dan peningkatan SDM terkait penerapan literasi SPBE dilingkup Perangkat Daerah.	3	4	17	

## LAMPIRAN 3.

## Daftar Prioritas Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : 2023 - 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Penyebab	Dampak
			Uraian	Kode Risiko	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h
	Tujuan 1 : Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
	Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Kurangnya kemandirian usaha UMKM dan IKM sehingga kualitas produknya belum mampu berdaya saing dengan industri lainnya	RSP.22.17.01.01	24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU dengan industri besar lainnya dalam hal penggunaan produk IKM dan UMKM belum ada</li> <li>2. Kurangnya akses modal ke lembaga keuangan dan kurangnya modal yang diperoleh dari Koperasi dibandingkan lembaga keuangan</li> <li>3. Kurangnya promosi dan pemasaran</li> <li>4. Kurangnya kemasan produk</li> <li>5. Kurangnya inovasi produk</li> <li>6. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM</li> <li>7. Legalitas usaha kurang maksimal berupa izin edar, label halal, izin BPOM, SNI</li> <li>8. Pelaku industri belum memiliki business plan</li> <li>9. Kurangnya informasi/promosi keberadaan wilayah kawasan industri di Kota Dumai</li> <li>10. Belum adanya rencana pemanfaatan lahan dan rencana induk penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri untuk mempermudah akses kegiatan industri.</li> <li>11. Terdapat ketidak sempurnaan dalam penetapan zonasi BWP di dalam dokumen RDTR Kawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pendapatan pelaku usaha</li> <li>2. Kurangnya minat masyarakat (pembeli) terhadap produk IKM dan UMKM</li> <li>3. Rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang tidak dimungkinkan melebihi pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun pada tahun 2010-2020</li> <li>4. Tidak ada penambahan nilai produks/kontribusi di sektor IKM</li> <li>5. Produk UMKM tidak mampu mendukung kebutuhan industri besar dalam pemenuhan standar perusahaan</li> <li>6. Tidak ada ekspansi ekonomi</li> <li>7. Peningkatan investasi di kawasan industri yang rendah</li> </ol>

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Penyebab	Dampak
			Uraian	Kode Risiko	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h
						Perkotaan dan Industri Kota Dumai 2021-2041 sehingga terkendalanya proses perizinan di beberapa lokasi di Kawasan Industri di Kota Dumai	
			Menurunnya PAD	RSP.22.37.01.08	24		Anggaran Belanja Pemerintah Daerah menurun
			Penimbunan barang tidak terkendali	RSP.22.30.01.06	23		inflasi
			Kurangnya transaksi ekonomi pada koperasi	RSP.22.17.01.02	19		Rendahnya kontribusi koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
			Panjangnya jalur distribusi	RSP.22.30.01.05	19		inflasi
			Penumpukan stock inventori tertahan dalam waktu yang menjadikan inventori menurun kualitasnya	RSP.22.30.01.07			Penambahan biaya produksi lain untuk dapat mempertahankan kualitas Hasil produksi
			Program pemerintah yang dijalankan terkait pengembangan pelaku usaha mengalami tumpang tindih dan tidak terarah	RSP.22.17.01.03	16		Pelaku usaha tidak dapat terfasilitasi dengan tepat dan sesuai kebutuhan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Penyebab	Dampak
			Uraian	Kode Risiko	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h
	Sasaran 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	2 Tingkat Pengangguran Terbuka	Terbatasnya peluang kesempatan kerja dan berwirausaha di Kota Dumai	RSP.22.07.01.09		1. Rendahnya kompetensi/ keahlian pencari kerja 2. Terbatasnya pertumbuhan industri baru/investasi baru 3. adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	1. Menurunnya tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	2 Ketersediaan Pangan Utama	Belum meratanya ketersediaan pangan	RSP.22.27.01.16		1. Ketergantungan supply dari daerah lain diantaranya masih tingginya ketergantungan impor pangan (Rohil sebagai penyangga ketahanan pangan Kota Dumai) 2. Kapasitas Produksi Kota Dumai sangat rendah (rasio produksi pangan yang hanya dua surplus dari 14 sumber pangan) 3. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang)	Tidak seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangannya
	Tujuan 2 : Membangun Masyarakat Dumai yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia					
	Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Kesehatan	Menurunnya kualitas hidup masyarakat	RSP.22.02.01.19		1. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan akibat pandemi COVID-19 2. Sarana prasarana layanan kesehatan belum merata dan memadai 3. Kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan yang masih belum merata dan mencukupi 4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Dumai belum tercapai 5. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal	'Meningkatnya mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Penyebab	Dampak
			Uraian	Kode Risiko	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h
	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Pendidikan	Rendahnya minat dan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan	RSP.22.01.08, 38.01.21		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhi kebutuhan sarana prasarana yang layak, memadai dan merata di bidang pendidikan</li> <li>2. Biaya sekolah yang tinggi, khususnya biaya TK Swasta</li> <li>3. Banyaknya jumlah sarana prasarana layanan pendidikan yang rusak, khususnya dalam akses jalan menuju sekolah</li> <li>4. Kesulitan memperoleh lahan untuk pembangunan sekolah</li> <li>5. Masih adanya pemberlakuan hukuman di sekolah</li> <li>6. Kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA)</li> <li>7. Masih adanya kasus kekerasan pada peserta didik</li> <li>8. Minimnya SDM psikolog/konselor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kualitas dan kuantitas peserta didik</li> <li>2. Meningkatnya angka putus sekolah</li> </ol>
	Sasaran 3: Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Pengeluaran	Kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan barang penting	RSP.22.30.01. 23		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya ketersediaan bahan pokok masyarakat dan barang penting</li> <li>2. Resesi global</li> </ol>	Daya beli masyarakat atas bahan pokok dan barang penting menurun
	Sasaran 4: Meningkatnya Penerapan Budaya Melayu	1 Persentase Penerapan 4 Jenis Budaya Melayu	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya melayu Kota Dumai	RSP.22.03.05, 22,31.01.24		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajemukan/kebergaman masyarakat di Kota Dumai</li> <li>2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi untuk penerapan tentang eksistensi budaya melayu</li> <li>3. Kurangnya pelestarian budaya melayu sebagai identitas budaya Kota Dumai</li> </ol>	Hilangnya identitas melayu di Kota Dumai
	Tujuan 3 : Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah					
	Sasaran 1: Meningkatnya Infrastruktur Kota	1 Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	Jalan akses untuk aktivitas masyarakat diantaranya sekolah, perkantoran, pasar, dan fasilitas kesehatan yang beririsan dengan aktivitas industri	RSP.22.03.01. 25		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran</li> <li>2. Keterbatasan kewenangan terkait kawasan hutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas</li> <li>2. Terganggunya produktivitas masyarakat dan industri</li> </ol>

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Penyebab	Dampak
			Uraian	Kode Risiko	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h
	Sasaran 2: Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	1 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Aturan	Lambatnya penyelesaian sengketa tanah di Kota Dumai terkait kawasan hutan dan kawasan BMN	RSP.22.04.01.36		Terbatasnya kewenangan Kota dalam mengatasi konflik pertanahan akibat regulasi yang membatasi kewenangan Pemko Dumai	Belum adanya kepastian kepemilikan tanah di masyarakat dan Pemko
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani	Ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat	RSP.22.06.01.42		1. Tidak sesuai kebutuhan masyarakat dengan standar bantuan yang dimiliki Pemko 2. Kurang koordinasi antar OPD dan instansi terkait lainnya	Masyarakat tidak menerima bantuan sesuai yang dibutuhkan

LAMPIRAN 4.

MATRIK RISIKO STRATEGIS PEMDA (INHERENT RISK)

LIKELIHOOD / KEMUNGKINAN / PROBABILITAS  GARIS TOLERANSI RISIKO	5	Hampir pasti				RSP.22.17.01.01 RSP.22.25.01.14 RSP.22.25.01.15 RSP.22.27.01.16 RSP.22.27.01.17 RSP.22.27.01.18 RSP.22.03.01.25 RSP.22.04.01.32 RSP.22.39.01.43 RSP.22.39.01.44 RSP.22.39.01.45 RSP.22.39.01.46 RSP.22.35.01.50	
	4	Kemungkinan besar			RSP.22.17.01.02 RSP.22.17.01.03 RSP.22.30.01.05 RSP.22.07.01.09 RSP.22.06.01.11 RSP.22.06.01.12 RSP.22.01,08, 38.01.21 RSP.22.01,19.01.22 RSP.22.03,05,22,31.01.24 RSP.22.15.01.26 RSP.22.03.01.27 RSP.22.03.01.28 RSP.22.03.01.30 RSP.22.15.01.31 RSP.22.04.01.33 RSP.22.04.01.36 RSP.22.04.01.37 RSP.22.11.01.38 RSP.22.11,03.01.40 RSP.22.35.01.49 RSP.22.16.01.56	RSP.22.07.01.10 RSP.22.04.01.34	RSP.22.30.01.07 RSP.22.37.01.08 RSP.22.25.01.13 RSP.22.03.01.29 RSP.22.37.01.47 RSP.22.37.01.48 RSP.22.12.01.54 RSP.22.12.01.55
	3	Mungkin		RSP.22.30.01.04	RSP.22.01,38.01.20 RSP.22.03,11.01.39 RSP.22.03.01.41 RSP.22.36.01.51 RSP.22.36.01.52 RSP.22.36.01.53	RSP.22.02.01.19 RSP.22.04.01.35	
	2	Sangat Kemungkinan kecil					
	1	Sangat jarang					
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
							GARIS TOLERANSI RISIKO
			IMPACT / DAMPAK				

LAMPIRAN 5.

MATRIK RISIKO STRATEGIS PEMDA (RESIDUAL RISK)

LIKELIHOOD / KEMUNGKINAN / PROBABILITAS  GARIS TOLERANSI RISIKO	5	Hampir pasti				RSP.22.30.01.06 RSP.22.12.01.54		
	4	Kemungkinan besar	RSP.22.07.01.10	RSP.22.17.01.03 RSP.22.06.01.12 RSP.22.03,05,22,31.01.24 RSP.22.11,03.01.40		RSP.22.17.01.02 RSP.22.30.01.05 RSP.22.30.01.07 RSP.22.25.01.14 RSP.22.25.01.15 RSP.22.27.01.17 RSP.22.27.01.18 RSP.22.01.08, 38.01.21 RSP.22.30.01.23 RSP.22.03.01.29 RSP.22.04.01.32 RSP.22.06.01.42 RSP.22.39.01.43 RSP.22.39.01.44 RSP.22.39.01.45 RSP.22.39.01.46 RSP.22.35.01.50	RSP.22.17.01.01 RSP.22.37.01.08 RSP.22.27.01.16 RSP.22.12.01.55	
	3	Mungkin		RSP.22.02.01.19 RSP.22.01,19.01.22 RSP.22.03.01.27 RSP.22.04.01.33 RSP.22.04.01.34 RSP.22.04.01.36 RSP.22.04.01.37 RSP.22.36.01.52 RSP.22.36.01.53		RSP.22.07.01.09 RSP.22.06.01.11 RSP.22.25.01.13 RSP.22.01,38.01.20 RSP.22.15.01.26 RSP.22.03.01.28 RSP.22.03.01.30 RSP.22.15.01.31 RSP.22.11.01.38 RSP.22.03,11.01.39 RSP.22.03.01.41 RSP.22.35.01.49 RSP.22.36.01.51 RSP.22.16.01.56	RSP.22.37.01.47 RSP.22.37.01.48	
	2	Kemungkinan kecil		RSP.22.30.01.04				RSP.22.03.01.25 RSP.22.04.01.35
	1	Sangat jarang						
				Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			GARIS TOLERANSI RISIKO					
			IMPACT / DAMPAK					

LAMPIRAN 6.

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : 2023 - 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Tujuan 1 : Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi													
	Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	1	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Kurangnya kemandirian usaha UMKM dan IKM sehingga kualitas produknya belum mampu berdaya saing dengan industri lainnya	RSP.22.17.0 1.01	1. MoU dengan industri besar lainnya dalam hal penggunaan produk IKM dan UMKM belum ada 2. Kurangnya akses modal ke lembaga keuangan dan kurangnya modal yang diperoleh dari Koperasi dibandingkan lembaga keuangan 3. Kurangnya promosi dan pemasaran 4. Kurangnya kemasan produk 5. Kurangnya inovasi produk 6. Kebijakan teknis bidang	1. Kurangnya pendapatan pelaku usaha 2. Kurangnya minat masyarakat (pembeli) terhadap produk IKM dan UMKM 3. Rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang tidak memungkinkan melebihi pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun pada tahun 2010-2020 4. Tidak ada penambahan	1. Melakukan promosi dengan keikutsertaan dalam pameran ditingkat nasional 2. Peta Potensi Investasi yang memuat dukungan secara umum untuk investasi 3. Melakukan promosi investasi secara online 4. Perda No.	1. Produk yang ditampilkan dalam pameran tidak melalui seleksi yang memberikan nilai tambah produk 2. Peta Potensi Investasi belum memuat kawasan industri secara detail 3. Promosi	1. Memperkuat dukungan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan Industri Besar serta mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan 2. Memantapkan kelembagaan	1. Rencana Induk Pembangunan Industri Kota 2. Jumlah koperasi yang aktif 3. Jumlah UMKM yang memajukan e-commerce 4. Pertem	1. Triwulan II tahun 2024 2. Triwulan I tahun 2023 3. Tahun 2024	1. Walikota cq Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2. Walikota cq Kepala DPMPPTS P; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	2	3

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
						perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM 7. Legalitas usaha kurang maksimal berupa izin edar, label halal, izin BPOM, SNI 8. Pelaku industri belum memiliki business plan 9. Kurangnya informasi/promosi keberadaan wilayah kawasan industri di Kota Dumai 10. Belum adanya rencana pemanfaatan lahan dan rencana induk penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri untuk mempermudah akses kegiatan industri. 11. Terdapat ketidak sempurnaan dalam penetapan zonasi BWP di dalam dokumen RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai 2021-2041 sehingga	nilai produks/kontribusi di sektor IKM 5. Produk UMKM tidak mampu mendukung kebutuhan industri besar dalam pemenuhan standar perusahaan 6. Tidak ada ekspansi ekonomi 7. Peningkatan investasi di kawasan industri yang rendah	15 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039; 5. Perwako No. 24 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai Tahun 2021-2041; 6. Perwako No. 33 Tahun 2021 tentang RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Medang Kampai Tahun 2021-2041.	Investasi secara online belum tepat menyasar investor yang sesuai 4. Cakupan RDTR belum atas seluruh KPI Kota Dumai 5. Fasilitas air bersih belum mencukupi untuk seluruh kawasan industri 6. Terdapat ketidaksempurnaan Dokumen RDTR sehingga berdampak terganggunya proses perizinan di Kota Dumai	pelaku usaha untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan daya saing produk usaha berupa penguatan koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha 3. Bantuan Modal Usaha Untuk UMKM Rintisan Pemasaran dengan E-Commerce 4. Promosi investasi dilakukan juga secara offline 5. Konsep pengembangan	uan dengan investor 5. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Dumai 6. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Sarana dan Prasarana Peruntukkan Industri Lubuk Gaung dan Pelintungan serta pengembangan		3. Walikota cq Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 4. Walikota cq Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian, Kepala DPMPSP 5. Walikota cq Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian 6. Walikota cq Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindust		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindakan Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
						terkendalanya proses perizinan di beberapa lokasi di Kawasan Industri di Kota Dumai				industri Kota Dumai termasuk membangun kawasan industri Selinsing 6. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri Lubuk Gaung dan Pelintung serta pengembangan kawasan industri lainnya 7. Membuat rencana induk pengembangan kawasan industri di Kota	an kawasan industri lainnya 7. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kota 8. Dokumen Review RDTR dan Perubahan Peraturan Walikota tentang Kawasan Industri dan Kota Dumai Tahun 2021-2041		rian, Kepala Dinas PUPR 7. Walikota cq Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian 8. Walikota cq Kepala Dinas PUPR		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
										Dumai 8. Melakukakan revisi terkait Peraturan Walikota tentang RDTR Kawasan Industri dan Kota Dumai Tahun 2021-2041					
	Sasaran 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	2 Tingkat Pengangguran Terbuka	Terbatasnya peluang kesempatan kerja dan berwirausaha di Kota Dumai	RSP.22.07.01.09	1. Rendahnya kompetensi/keahlian pencari kerja 2. Terbatasnya pertumbuhan industri baru/investasi baru 3. adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	1. Menurunnya tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Sosialisasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Perwako No. 37 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal. 2. Pelatihan kepada Angkatan Kerja	1. Pelatihan Angkatan Kerja belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja. 2. Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Perwako No. 37 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal. tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1. Menambah jenis pelatihan sesuai kebutuhan industri dan pelabuhan di Kota Dumai dengan memfungsikan 4 rumah terampil di Dumai Timur, Sungai Sembilan, Medang Kampai, dan Bukit Kapur 2. Pengemb	1. Memfungsikan 4 rumah terampil 2. Jumlah pemuda/Angkatan Kerja yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha di Kota Dumai	1. 1 rumah terampil per tahun 2. Tahun 2023 - 2026	Walikota	2	3	11

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
									angan potensi pemuda/ Angkatan Kerja melalui pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha 3. Mengembangkan dan Memperbanyak Usaha yang Menyerap banyak tenaga Kerja (File PPD 2022 Hal 29) 4. Pengembangan Potensi Pemuda Melalui Pelatihan Sesuai dengan Kompetensi dan Kebutuhan Dunia Usaha (File PPD						

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
									2022 Hal 29)						

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindakan Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1 Skor Pola Pangan Harapan (Kualitas Konsumsi Pangan)	Rendahnya ketersediaan pangan di Kota Dumai	RSP.22.25.01.14	1. Kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan kepada konsumen (ex: pasar, stok es, cool storage) 2. Keterbatasan wilayah penangkapan yang menyatu dengan jalur pelayaran 3. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tari (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia	1. Kesulitan masyarakat dalam memperoleh ikan 2. Tidak terpenuhinya keberagaman kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat	1. ekstensifikasi perikanan 2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Budidaya tambak dan laut di Kota Dumai sesuai dengan RZWP3K kepada DKP Provinsi Riau 3. Pembinaan kepada pembudidaya secara intensif dan sharing ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pembudidayaan ikan 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan 5. Sosialisasi Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1. membutuhkan biaya yang besar 2. belum ada pemetaan daerah potensi perikanan yang diberikan kurang diindahkan oleh masyarakat karena keterbatasan ekonomi	1. Menetapkan Peraturan Pemerintah Daerah tentang praktik perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keberlanjutan dan kualitas ikan 2. Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan; 3. Pasar Tani 4. Sosialisasi Pangan dan Pengawasan	1. Peraturan 2. Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pertanian Lahan pekarangan 3. Jumlah Pasar Tani Yang Dilaksanakan 4. Jumlah Sosialisasi dan Pengawasan	2023-2026	walikota cq Kepala dinas perikanan	3	5	22

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk			
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
					<p>4. Belum adanya peraturan pemerintah tentang praktik perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keberlanjutan dan kualitas ikan</p> <p>5. Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional</p> <p>6. Sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya</p> <p>7.</p>					Keamanan Pangan						



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Kesehatan	Menurunnya kualitas hidup masyarakat	RSP.22.02.01.19	1. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan akibat pandemi COVID-19 2. Sarana prasarana layanan kesehatan belum merata dan memadai 3. Kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan yang masih belum merata dan mencukupi 4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Dumai belum tercapai 5. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal	'Meningkatnya mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan)	Upaya preventif, promotif (penyuluhan), kuratif, seperti: 1. Pelayanan gizi masyarakat 2. Pemberian makanan tambahan 3. Ambulance 24 jam di tingkat Kecamatan 4. Membantu Premi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak 5. Memberikan kemudahan layanan di Puskesmas dan RSUD Kota Dumai	Masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama untuk pelaksanaan pencapaian Standar pelayanan Minimal diantaranya pengembangan Puskesmas Rawat Inap di Daerah yang jauh dari Kota 2. memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan memperluas cakupan UHC	1. Jumlah Faskes yang ditingkatkan sarana pelayanan nya	2023-2026	Walikota cq. Kepala Dinkes;	2	2	7

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Pendidikan	Rendahnya minat dan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan	RSP.22.01,08,38.01.21	1. Belum terpenuhi kebutuhan sarana prasarana yang layak, memadai dan merata di bidang pendidikan 2. Biaya sekolah yang tinggi, khususnya biaya TK Swasta 3. Banyaknya jumlah sarana prasarana layanan pendidikan yang rusak, khususnya dalam akses jalan menuju sekolah 4. Kesulitan memperoleh lahan untuk pembangunan sekolah 5. Masih adanya pemberlakuan hukuman di sekolah 6. Kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan tentang	1. Menurunnya kualitas dan kuantitas peserta didik 2. Meningkatnya angka putus sekolah	1. Menginput data sarpras pada aplikasi DAPODIK sesuai kondisi riil dalam rangka pemetaan pembangunan layanan pendidikan 2. Penerapan sistem zonasi 3. Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak 5. Penjangkauan kasus bersama psikolog/konselor 6. Koordinasi dengan sektor internal dan eksternal	1. Penyampaian data sarpras yang diinput pada aplikasi DAPODIK tidak sesuai dengan kondisi riil 2. Tidak tertampungnya peserta didik khususnya di wilayah perkotaan 3. Masih rendahnya pemahaman peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap pentingnya pendidikan	1. Meningkatkan prioritas pembangunan jalan ke sekolah 2. rekrutmen tenaga psikolog/konselor penanganan Kekerasan Anak	1. Pembangunan jalan menuju sekolah 2. Jumlah tenaga psikologi/konselor yang terpenuhi	2023 - 2026	Walikota cq Kepala Disdikbud; Kepala BKPSDM; Kepala DPPPA	3	3	14

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
					Sekolah Ramah Anak (SRA) 7. Masih adanya kasus kekerasan pada peserta didik 8. Minimnya SDM psikolog/konselor										
	Sasaran 3: Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	1 Indeks Pengeluaran	Kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan barang penting	RSP.22.30.01.23	1. Kurangnya ketersediaan bahan pokok masyarakat dan barang penting 2. Resesi global	Daya beli masyarakat atas bahan pokok dan barang penting menurun	1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah 2. Pengawasan terhadap distributor	Stok barang tetap tersedia	1. Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi produksi lokal bahan pokok masyarakat dan barang penting 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan pihak	1. Jumlah produk lokal yang diintensifikasi dan diversifikasi 2. Hasil Koordinasi dengan stakeholder lainnya 3. Pelaksanaan Road Map Inflasi	2023-2026	1. Walikota cq Kepala Dinas Perdagangan	3	4	17



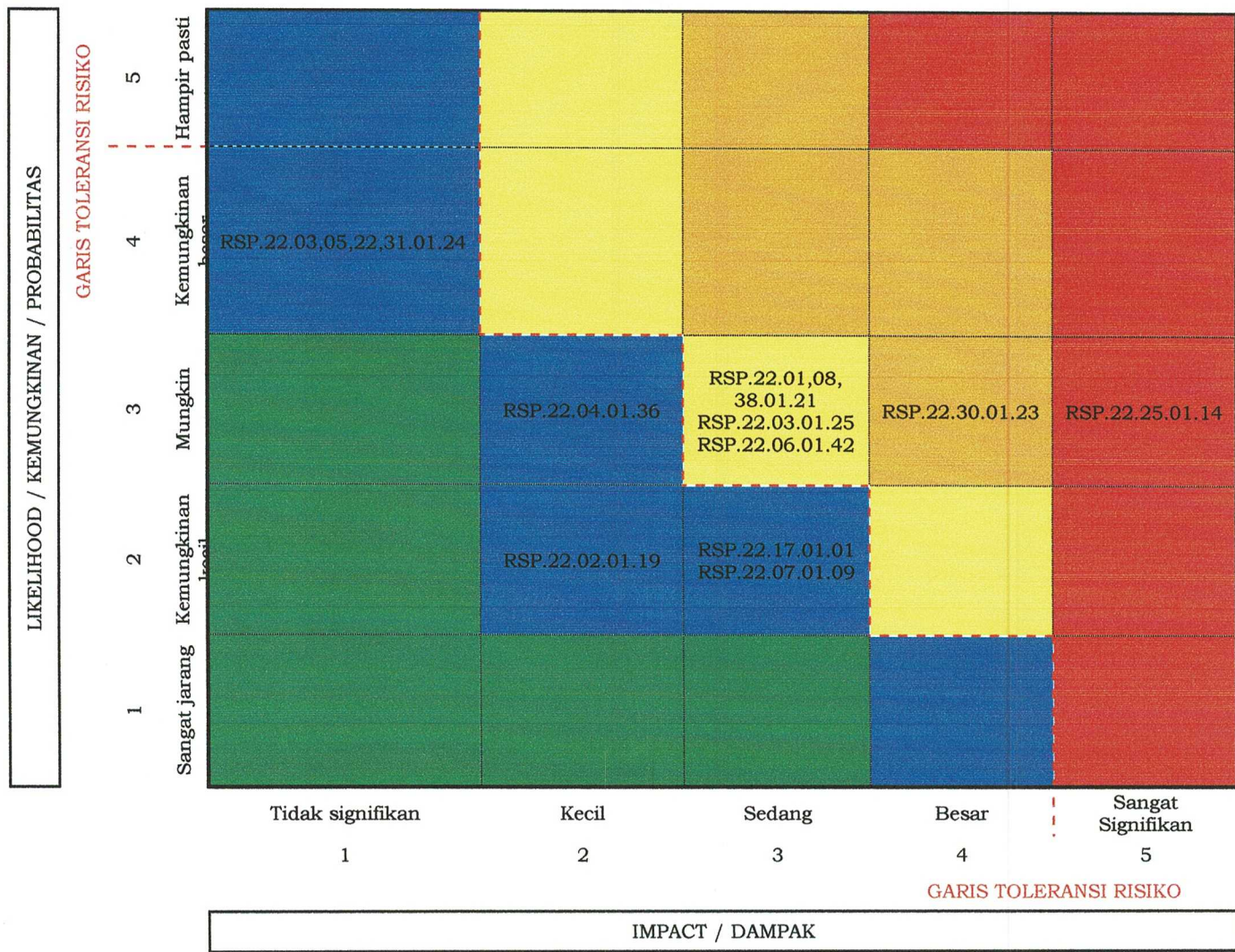
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Berwawasan Lingkungan														
	Sasaran 1: Meningkatnya Infrastruktur Kota	1 Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	Jalan akses untuk aktivitas masyarakat diantaranya sekolah, perkantoran, pasar, dan fasilitas kesehatan yang beririsan dengan aktivitas industri	RSP.22.03.01.25	1. Keterbatasan anggaran 2. Keterbatasan kewenangan terkait kawasan hutan	1. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas 2. Terganggunya produktivitas masyarakat dan industri	1. Pemeliharaan jalan provinsi 2. Pengawasan oleh Dishub 3. Pembatasan waktu bagi kendaraan industri untuk beroperasi 4. Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTRW 2019-2039 5. Melaksanakan penyusunan AMDAL 6. Penyusunan perda terkait tonase kendaraan industri (crosscutting dengan Dishub)	Belum tertibnya kendaraan industri yang melintasi jalan akses sesuai jadwal pembatasan waktu dan aturan tonase kendaraan (ODOL)	Mewujudkan akses jalan lingkar luar (outter ringroad) melalui upaya: 1. Pengusulan Jalan Outter Ringroad terdiri atas 3 (tiga) segmen melalui APBN maupun Investor 2. Pengusulan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di KLHK 3. Pengadaan patok batas jalan (crosscutt	1. Tersedianya akses jalan outer Ringroad 2. Tersedianya Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan 3. Terpasangnya patok batas jalan	1. Tahun 2024 2. Tahun 2023 3. Tahun 2023	1. Walikota cq. Dinas PUPR 2. Walikota cq. Dinas Perkimtan dan Dinas PUPR 3. Walikota cq. Dinas Perkimtan	3	3	14

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
									ing dengan Bidang Pertanahan Perkim)						
	Sasaran 2: Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	1 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Aturan	Lambatnya penyelesaian sengketa tanah di Kota Dumai terkait kawasan hutan dan kawasan BMN	RSP.22.04.01.36	Terbatasnya kewenangan Kota dalam mengatasi konflik pertanahan akibat regulasi yang membatasi kewenangan Pemko Dumai	Belum adanya kepastian kepemilikan tanah di masyarakat dan Pemko	Melakukan upaya sosialisasi/mediasi terhadap pihak yang bersengketa/berkonflik sesuai kewenangan Pemko Dumai	Hasil sosialisasi/mediasi belum dapat menyelesaikan permasalahan secara maksimal	Koordinasi Walikota dengan internal pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta pihak lainnya	Hasil dokumentasi atas Kepastian hukum terhadap tanah sesuai Undang-undang yang berlaku	2022-2026	Walikota cq Kepala Dinas Perkimta n	3	2	10
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani	Ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat	RSP.22.06.01.42	1. Tidak sesuai kebutuhan masyarakat dengan standar bantuan yang dimiliki Pemko 2. Kurang koordinasi antar OPD dan instansi terkait lainnya	Masyarakat tidak menerima bantuan sesuai yang dibutuhkan	Memberikan bantuan berdasarkan laporan dari pihak kelurahan yang terkena bencana sesuai dengan standar bansos dari dinas sosial	Bantuan yang diberikan tidak optimal	1. Memberikan bantuan kepada korban bencana secara optimal 2. Menyusun Kebijakan terkait bantuan sosial terhadap korban bencana	1. Persentase Korban bencana yang diberikan bantuan / tertangani 2. Perwa/Perda terkait bansos korban bencana	2023-2026	Walikota cq. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3	3	14

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Target	Risiko		Sebab	Dampak	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab	Treated Risk		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
									3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah						

LAMPIRAN 7.

MATRIK RISIKO STRATEGIS PEMDA (TREATED RISK)



WALI KOTA DUMAI,

*(Handwritten signature)*  
PAISAL